



**Badan Penerbit  
Universitas Pancasakti Tegal**

# **DIKTAT MATA KULIAH SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Su

**Penulis: Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M. SI  
Editor: Arif Zainudin, M.IP**

# **DIKTAT MATA KULIAH SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

## **Tim Penyusun**

Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si

Arif Zainudin, M.IP

Badan Penerbit

Universitas Pancasakti Tegal

# **DIKTAT MATA KULIAH**

## **SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Tim Penyusun

Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si

Arif Zainudin, M.IP

Cetakan 1, Agustus 2020

Diterbitkan oleh:

Badan Penerbit Universitas Pancasakti Tegal

Jl. Halmahera Km.01 Kota Tegal

ISBN: .....-.....-.....

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Diktat Mata Kuliah Sosiologi Pemerintahan telah dapat diselesaikan. Buku ini adalah buku yang ditujukan kepada mahasiswa Ilmu pemerintahan sebagai buku referensi dalam pembelajaran.

Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada dosen – dosen sejawat yang telah memberikan masukan kepada kami sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta ucapan terima kasih kami untuk semua yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Dan semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan khususnya dan bagi semua pihak dari segala lapisan yang membutuhkan.

Agustus, 2020

Sri Sutjiatmi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI.....	5
BAB I	
KONSEP DASAR SOSIOLOGI PEMERINTAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
A. PENGERTIAN SOSIOLOGI .....	Error! Bookmark not defined.
B. PENGERTIAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
C. ARTI PENTING STUDI SOSIOLOGI PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
D. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN .....	Error! Bookmark not defined.
EVALUASI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II	
PENDEKATAN DALAM SOSIOLOGI PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. TERJADINYA DOMINASI KELOMPOK DALAM MASYARAKAT.....	Error! Bookmark not defined.
B. PENDEKATAN DALAM SOSIOLOGI PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
C. PENDEKATAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN DAN ISSUE-ISSUE.....	Error! Bookmark not defined.
DALAM MASYARAKAT.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN .....	Error! Bookmark not defined.
EVALUASI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	
PEMERINTAHAN DAN CIVIL SOCIETY .....	Error! Bookmark not defined.
A. FUNGSI PEMERINTAH DALAM NEGARA DEMOKRASI.....	Error! Bookmark not defined.
B. AKTOR-AKTOR DALAM SOSIOLOGI PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
C. CIVIL SOCIETY ( MASYARAKAT SIPIL ) .....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN .....	Error! Bookmark not defined.
EVALUASI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	
KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DALAM PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. KEKUASAAN.....	Error! Bookmark not defined.
B. KEWENANGAN DAN LEGITIMASI .....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN .....	Error! Bookmark not defined.
EVALUASI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	
SOSIALISASI DAN BUDAYA POLITIK DALAM PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. SOSIALISASI POLITIK .....	Error! Bookmark not defined.
B. BUDAYA POLITIK .....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN .....	Error! Bookmark not defined.

EVALUASI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VI	
KONFLIK DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
A. PENGERTIAN KONFLIK .....	Error! Bookmark not defined.
B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK..	Error! Bookmark not defined.
C. KONFLIK POLITIK.....	Error! Bookmark not defined.
D. PENYEBAB KONFLIK POLITIK .....	Error! Bookmark not defined.
E. FUNGSI KONFLIK .....	Error! Bookmark not defined.
F. MANAJEMEN KONFLIK.....	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN .....	Error! Bookmark not defined.
EVALUASI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB VII	
BIROKRASI DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA .....	Error! Bookmark not defined.

## **B A B I**

### **KONSEP DASAR SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

#### **Tujuan Pembelajaran :**

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dengan baik konsep- konsep dasar sosiologi, pengertian sosiologi pemerintahan dan pentingnya mempelajari sosiologi pemerintahan serta ruang lingkup studi sosiologi Pemerintahan.

#### **PENDAHULUAN**

Sosiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan, telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga menimbulkan cabang-cabang baru yang lebih spesifik di dalam menganalisa dan menyelesaikan persoalan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan dinamika masyarakat yang semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, namun dalam hubungan masyarakatpun menimbulkan dampak yang mau tidak mau harus kita alami. Sosiologi sebagai salah satu ilmu yang berhubungan dengan kegiatan masyarakatpun dituntut untuk menyesuaikan diri, sehingga muncullah ilmu sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi pemerintahan dan sebagainya.

Sebelum kita mempelajari sosiologi pemerintahan, kita akan memulai dengan konsep dasar, yang akan membahas pengertian sosiologi, sosiologi pemerintahan dan arti penting studi sosiologi pemerintahan serta ruang lingkup studi sosiologi Pemerintahan.

#### **A. PENGERTIAN SOSIOLOGI**

Ilmu sosiologi sebagai salah satu ilmu social telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Secara etimologi, istilah “ sosiologi” berasal dari kata *socius* ( bahasa latin ) yang berarti teman, dan *logos* ( bahasa Yunani ) yang berarti ilmu, kata, sabda. Berdasarkan kata-kata tersebut, beberapa ahli mendefinisikan pengertian sosiologi dengan sudut pandang masing-masing. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan sosiologi, antara lain :

1. Pitirim Sorokin ( Dalam Soekanto, 2003 : 19 ), menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari :
  - a. Hubungan dan pengaruh timbale balik antara berbagai macam gejala social ( misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya ),
  - b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala social dan gejala non social ( misalnya gejala geografis, biologis, ekologis dan sebagainya ),
  - c. Ciri-ciri umum dari semua jenis gejala social.
2. Reece Mc. Gee dalam bukunya Sociology : An Introduction ( 1977 ), merumuskan tiga pengertian sosiologi, sebagai berikut :
  - a. Sosiologi dijelaskan sebagai studi tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku individual,
  - b. Sosiologi dijelaskan sebagai studi tentang tatanan social dan perubahan social,
  - c. Sosiologi dijelaskan sebagai pencarian sebab-sebab social dari hal-hal, cara-cara dimana fenomena social mempengaruhi perilaku manusia.
3. Raucek dan Warren mengemukakan Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok.
4. Selo Sumardjan dan Soeleman Soemardi mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses social, termasuk perubahan social. Struktur social adalah kaidah-kaidah ( norma-norma social ), lembaga-lembaga social, kelompok social serta lapisan-lapisan social. Proses social adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama.
5. Hassan Shadily dalam bukunya Sosiologi Masyarakat Indonesia menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan ini.
6. August Comte mengatakan bahwa ilmu Sosiologi adalah ilmu yang didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang bersifat empiris dan sistematis. Dalam mengkaji masyarakat, Comte membagi sosiologi dalam dua kategori,



yaitu :

- a. *Static Social* ( social statis, terkait dengan statika social atau struktur social ), mencakup struktur social masyarakat berupa kelompok, lembaga-lembaga social, lapisan dan kekuasaan.
  - b. *Dynamic Social* ( social dinamis, terkait dengan dinamika social atau perubahan social ). Sosial dinamis adalah fungsi-fungsi masyarakat yang terlibat dalam proses social, perubahan social, atau interaksi dan konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok.
7. Y. B.A. F. Mayor Polak mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antar manusia, manusia dengan kelompok, baik formil maupun materiil, baik statis maupun dinamis.

Dari berbagai definisi di atas, menurut Rina Martini dkk sosiologi mempelajari tiga hal pokok, yaitu :

- a. Masyarakat, yang berwujud interaksi individu dan individu, kelompok dan kelompok atau individu dan kelompok,
- b. Lembaga social, yaitu sebuah organisasi yang berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam setiap interaksi yang terjadi pada pelbagai macam kelompok dan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat,
- c. Interaksi social, yaitu hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang berupa kerjasama, akomodasi, persaingan maupun konflik.

## **B. PENGERTIAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa pusat perhatian sosiologi adalah tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok, namun lebih banyak pada kelompoknya dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga merupakan studi tentang tingkah laku manusia dalam konteks social, atau lebih tegas lagi bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat yang mencakup hubungan antara seseorang dengan orang lain, antara perseorangan dengan kelompok dan hubungan antara kelompok dengan kelompok lainnya.

Kalau kita membahas pemerintahan, pastilah akan kita ingat kembali bahwa unit analisa studi pemerintahan adalah negara dan pemerintahan berasal dari kata “ perintah “ yang mengandung beberapa unsure pokok, yaitu ada dua pihak, yakni yang memerintah dan yang diperintah, kedua pihak tersebut mempunyai hubungan fungsional, pihak yang memerintah mempunyai wewenang dan pihak yang diperintah mempunyai ketaatan. Sedangkan pengertian ilmu pemerintahan telah banyak disajikan oleh banyak pakar. Afan Gaffar, misalnya mengatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik ( alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat ) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.

Dengan menggabungkan pengertian sosiologi dan ilmu pemerintahan di atas, kemudian berkembang menjadi Sosiologi pemerintahan. Secara **umum**, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah ( masyarakat ) dengan yang memerintah ( pemerintah ) yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Secara **khusus**, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah ( masyarakat ) dengan yang memerintah ( pemerintah ) khususnya tentang sejauhmana pengaruh dari yang memerintah ( pemerintah ) mampu dalam mengadakan perubahan hubungan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat dan sebaliknya juga melihat sejauhmana yang diperintah ( masyarakat ) atau kelompok-kelompok dalam masyarakat diubah dalam hubungan-hubungan masyarakat tersebut.

Menurut Taliziduhu Ndraha, Sosiologi Pemerintahan adalah kajian tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa public yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil dilihat dari sudut proses social, institusi social, perilaku social dan system nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat.

### **C. ARTI PENTING STUDI SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Sosiologi Pemerintahan sebagai salah satu kajian ilmu social dalam perkembangan masyarakat merupakan sebuah ilmu yang semakin mendapat perhatian dari kalangan intelektual. Hal ini dilandasi sebuah pemikiran , bahwa di dalam sebuah proses politik, pasti bertolak dari kenyataan adanya sifat dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk social. Pemahaman sebagai makhluk individu dan social merupakan titik tolak dalam memahami sosiologi pemerintahan.

Sebagai makhluk **individu**, manusia mempunyai dua komponen, yakni jiwa dan raga, sehingga dalam perkembangannya perlu adanya keterpaduan diantara keduanya. Sebagai makhluk individu, manusia hidup dan bertanggungjawab terhadap kehidupannya. Karena sifat yang demikian, setiap orang pasti mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga kadang menimbulkan konflik. Sifat dasar yang demikian oleh penganut aliran individualistic dimaknai sebagai satu ketetapan yang mana individu mempunyai hak mutlak yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan hak-hak individu ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bersama. Sebagai konsekuensinya, upaya pemenuhan berbagai kepentingan individu diprioritaskan daripada kepentingan masyarakat.

Sebagai makhluk **social**, individu hidup bersama di dalam masyarakat, di mana akan terjadi interaksi social dan ia adalah pelaku proses social tersebut. Proses social meliputi proses asosiatif ( proses dekat mendekati ) dan proses dissosiatif ( jauh menjauhi ). Apabila di lihat dari sudut pelaku, mendekati yang satu dapat berarti menjauhi yang lain. Sebagai makhluk social, ia bertanggungjawab sebagai bagian dari kehidupan bersama, sehingga berbeda dengan paham individualistic yang memandang sifat social manusia hanya sekunder. Pada penganut aliran kolektifisme, kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, sehingga individu bahkan kepentingan individu dapat dikorbankan demi kepentingan masyarakat.

Kedua pandangan di atas merupakan pandangan yang bersifat ekstrim, karena masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Namun ada pandangan yang mengkombinasikan keduanya, yakni paham yang seimbang, di mana pada hakekatnya manusia tidak bisa melepaskan diri dari orang lain, sehingga di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk social. Pandangan ini menegaskan bahwa antara individu dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Masyarakat secara hakiki menentukan individualitas dan kepribadian manusia. Hidup dan berkembangnya individu sangat tergantung pada orang lain. Kenyataan tersebut disebabkan bahwa pada diri manusia mempunyai dua dimensi, yakni **dimensi social dan dimensi politik**.

**Dimensi social** yang dimiliki oleh manusia menurut Magniz Suseno merupakan ketergantungan dan keterlibatan individu dengan masyarakat. Sifat kesosialan manusia menjelma dalam tiga dimensi, yakni :

- a. Dalam penghayatan spontan manusia
- b. Berhadapan dengan lembaga-lembaga social,
- c. Melalui pengertian-pengertian simbolis terhadap realitas.

Adanya sifat ketergantungan manusia dengan masyarakat, pertama-tama disadari dan dihayati manusia dalam kehidupan yang nyata dan spontan setiap hari. Semua kegiatan yang dilakukan manusia akan sangat dirasakan ditentukan oleh adanya manusia yang lain; sehingga dengan demikian manusia membutuhkan **kebersamaan**.

Hubungan social yang dilakukan manusia tidak bersifat tanpa bentuk, akan tetapi berstruktur. Ada kebutuhan individu yang hanya dapat dipenuhi dalam kebersamaan dengan orang lain, dan ada yang lebih banyak lagi dimana pemenuhannya sangat dipermudah apabila diusahakan bersama-sama. Untuk menjamin agar fungsi-fungsi itu lestari, dikembangkan pola-pola bertindak bersama yang tidak lagi tergantung dari orang-orang dan situasi-situasi tertentu. Pola-pola tindakan bersama tersebut disebut sebagai lembaga.

**Dimensi kesosialan manusia** yang lain adalah segala macam paham, kepercayaan, pandangan tentang makna realitas sebagai keseluruhan. Dunia simbolik, pengertiannya termasuk agama, pandangan dunia, system nilai dan pandangan moral, politik dan estetis, keyakinan-keyakinan filsafati dan bermacam ideology. Fungsi utama system tersebut adalah memberikan legitimasi terhadap struktur-struktur social yang dihadapi manusia sehingga ia mendapatkan orientasi dan kepastian.

Di samping mempunyai dimensi kesosialan, manusia juga mempunyai dimensi politis. Menurut Frans Magniz Suseno, **dimensi politis** manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Ciri khas suatu pendekatan “ politis “ yakni bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh

tindakannya. Dimensi politis ini mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan Negara, system-sistem nilai serta ideology yang memberikan legitimasi kepadanya.

Dengan pemahaman yang komprehensif tentang hakekat manusia sebagai makhluk individu dan social di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Kita membutuhkan lembaga-lembaga social, masyarakat dan Negara serta membutuhkan system nilai dan ideology yang menjadi pedoman dan tujuan hidupnya sebagai warganegara. Demikian pula sebaliknya, proses hidupnya sebagai pribadi turut memberi bentuk kepada lembaga social, system nilai dan ideology yang bersangkutan

Hidup manusia hanya mungkin terlaksana dalam interaksi yang bersifat kompleks dengan berbagai aspek social, termasuk di dalamnya interaksi dengan pemerintah yang diatur dengan aturan tertentu. Keberadaan pemerintah atau Negara diperlukan dalam rangka memadukan potensi dan kekuatan nyata yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang sudah disepakati bersama.

Dengan demikian, fungsi Negara adalah sebagai wasit dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan interaksi dengan berbagai aspeknya. Untuk itu pemerintah harus mempunyai kewenangan yang sah untuk melaksanakan fungsinya, disertai dengan sebuah pertimbangan bahwa aspek kepentingan masyarakat harus lebih dikedepankan.

#### **D. RUANG LINGKUP SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Sebagai sebuah ilmu yang mengalami perkembangan cukup signifikan, sosiologi Pemerintahan mempunyai beberapa ruang lingkup yang menjadi pokok kajiannya. Ada beberapa kajian yang merupakan ruang lingkup dari Sosiologi Pemerintahan, yaitu :

1. **Gejala-gejala pemerintahan dan Civil Society.** Pemerintahan suatu negara akan mengalami dinamika, dimana peran masyarakat akan semakin menonjol, disinilah kemudian akan melahirkan masyarakat madani ( civil society ) secara alamiah. Pada negara tertentu, munculnya masyarakat madani dapat berkembang dan tetap eksis, namun bisa jadi di suatu negara masyarakat madani tidak dapat berkembang karena kuatnya tekanan dari pemerintah. Dalam negara yang

demokratis, fenomena masyarakat madani menjadi hal yang mutlak, bahkan eksistensinya akan semakin canggih,

2. **Gejala kekuasaan dan kewenangan.** Gejala kekuasaan merupakan fenomena yang menyertai keberadaan masyarakat, hal ini terjadi karena di masyarakat pasti akan muncul sekelompok orang dapat mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok orang yang mempunyai kekuasaan pasti melekat kewenangan. Di dalam kekuasaan mengandung unsure-unsur pengaruh, kepatuhan, pemaksaan dan otoritas.. Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, namun kewenangan menekankan pada unsure hak, yakni pemegang kewenangan mempunyai hak untuk melakukan dan menetapkan sesuatu, yang berarti bahwa kekuasaannya memiliki legitimasi. Implementasi dari gejala kekuasaan dan kewenangan bisa dilihat dari adanya dominasi antara individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain, sehingga akan muncul fenomena : ( 1 ) pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah, atau ( 2 ) pihak yang menguasai dan pihak yang mentatati, dimana pihak yang menguasai selalu jumlahnya lebih kecil dari pihak yang dikuasai.
3. **Gejala konflik dalam pemerintahan.** Penyelenggaraan pemerintahan di dalam pelaksanaannya pasti akan menimbulkan konflik. Konflik akan terjadi manakala kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam masyarakat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tegasnya, konflik akan terjadi manakala penguasa tidak mampu mendistribusikan secara adil kekuasaan yang dimiliki kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan konflik juga dapat terjadi apabila ada perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat tentang hakekat kekuasaan dan kewenangan itu sendiri.
4. **Gejala birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan.** Birokrasi sebagai salah satu ruang lingkup sosiologi pemerintahan mempunyai tipe yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Di Indonesia, khususnya, budaya jawa masih sangat dominant, sehingga birokrasi yang ada juga masih terpengaruh budaya jawa. Demikian juga dengan kepemimpinan yang ada di birokrasi sangat dipengaruhi budaya yang dianut masyarakat.

5. **Kebijakan pemerintah.** Kebijakan pemerintah sebagai implementasi dari peran regulasi pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pemerintah. di mana pada hakekatnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat , sehingga kebijakan yang diambil harus benar-benar bermuara pada aspirasi masyarakat, karena apabila ini diabaikan pasti akan mendapatkan reaksi yang negative dari masyarakat.

---

## **RINGKASAN**

Sosiologi Pemerintahan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan semakin diperlukan dalam kehidupan manusia, hal ini beranjak bahwa di dalam diri manusia terdapat dua dimensi yang saling berkaitan, yakni dimensi social dan dimensi politik yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sosiologi Pemerintahan mempelajari masyarakat, lembaga social dan interaksi yang ada di dalam masyarakat. Ada beberapa ruang lingkup bahasan sosiologi pemerintahan, yaitu gejala pemerintahan dan civil society, gejala kekuasaan dan kewenangan, gejala konflik dalam pemerintahan, gejala birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan dan kebijakan pemerintah.

## **EVALUASI**

1. Jelaskan pengertian Sosiologi Pemerintahan secara umum ?
2. Jelaskan dimensi yang dimiliki manusia ?
3. Jelaskan makna dimensi social dari manusia ?
4. Jelaskan ruang lingkup Sosiologi Pemerintahan ?

## **REFERENSI**

1. Rina Martini, dkk, Sosiologi pemerintahan, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
2. Suryadi, Budi, Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan perkembangan konsep, penerbit IRCiSoD, Yogyakarta, 2007,
3. Ndraha, Taliziduhu, Kybernologi ( Ilmu pemerintahan Baru ), Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
4. Mas' oed, Mochtar, Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1984
5. Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007



## **B A B II**

### **PENDEKATAN DALAM SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

#### **TUJUAN PEMBELAJARAN :**

Setelah mengikuti materi pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mengerti dan memahami beberapa pendekatan yang dipakai dalam sosiologi pemerintahan dan mengkaitkan pendekatan tersebut dalam berbagai issue yang ada di masyarakat.

#### **PENDAHULUAN**

Sosiologi Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara pemerintah dan masyarakat khususnya tentang sejauhmana pemerintah mampu merubah hubungan-hubungan yang ada di masyarakat dan sebaliknya sejauhmana masyarakat dapat diubah dalam hubungan yang ada, membutuhkan alat atau pendekatan dalam menganalisa issue-isue yang ada di masyarakat. Pendekatan itu menjadi sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seiring dengan dinamika masyarakat. Berbagai issue yang dikaji oleh Sosiologi pemerintahan antara lain berkaitan dengan negara, masyarakat, pelapisan social, perubahan social dan kekuasaan.

#### **A. TERJADINYA DOMINASI KELOMPOK DALAM MASYARAKAT**

Dalam bahasa Inggris, masyarakat adalah “ society” yang berasal dari kata “ socius “, yang berarti kawan, sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yakni “ syirk “, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini terjadi karena ada aturan-aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia perorangan, melainkan oleh unsure-unsur kekuatan lain dalam lingkungan social yang merupakan satu kesatuan. Manusia semenjak lahir sampai mati sebagai anggota masyarakat, pasti melakukan interaksi karena mempunyai nilai, norma, cara-cara yang merupakan kebutuhan bersama. Dari kenyataan tersebut, nyatalah bahwa dalam proses interaksi terjadi saling pengaruh mempengaruhi di antara anggota masyarakat. Menurut Suryadi ( 2007 : 28 ), **masyarakat** adalah suatu sistem kebiasaan, adat, dan aturan-aturan, sistem kekuasaan dan kerjasama, sistem pengelompokan orang-orang dan golongan-

golongannya, sistem pengawasan terhadap tingkah laku manusia serta segala kebebasannya. Menurut **Radam** ( dalam Suryadi, 2007, 29 ), masyarakat hanya ada apabila pilar-pilarnya yang esensial mendukung. Ada **empat pilar** yang diperlukan, yaitu ( 1 ) kelompok social, ( 2 ) kendali-kendali social, ( 3 ) media social dan ( 4 ) sistem tolok ukur social.

**Kelompok social** dalam masyarakat terdiri dari bermacam-macam, dari yang lemah ikatan antara anggotanya sampai yang kuat dan permanent berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Anggota masyarakat tersebut juga terbagi atas dasar ketentuan hierarkhis tertentu, misalnya berdasarkan status social warganya. **Sistem kendali social** meliputi factor regulative dalam kehidupan masyarakat, misalnya etiket, moral, hukum, di mana factor ini akan menentukan perilaku social. **Media social** meliputi barang dan bahasa. Melalui bahasa orang melakukan interaksi, menyatakan pendapat dan perasaannya serta mengekspresikan diri. Bahasa dapat menunjukkan derajat seseorang. Melalui barang dan jasa orang dapat saling berkomunikasi. Barang-barang dapat menjadi obyek emosional banyak orang. **Sistem tolok ukur** adalah representasi nilai yang dianut masyarakat. Sistem nilai akan merangsang dan membimbing tingkah laku masyarakat.

Sementara itu **Talcot Parson** ( dalam Sunarto 2000 : 56 ) merumuskan masyarakat sebagai suatu sitem social yang swasembada, melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya. Sedangkan **Marion Levy** ( dalam Sunarto, 2000 : 56 ) mengemukakan empat criteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, yaitu ( 1 ) kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu, ( 2 ) rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi, ( 3 ) kesetiaan pada tindakan utama bersama dan ( 4 ) adanya system tindakan bersama yang bersifat “ swasembada “.

Sebagaimana di jelaskan dalam setiap literature, di dalam masyarakat akan selalu terjadi gejala kekuasaan. Kekuasaan muncul karena adanya ketimpangan dalam masyarakat di berbagai bidang, misalnya ketidaksamaan di bidang kekayaan, pendidikan, dan lain-lain. Ketidaksamaan ini akan menimbulkan hubungan kekuasaan,

yaitu suatu hubungan yang bersifat eksploitatif antara mereka yang berkuasa dengan yang tidak mempunyai kekuasaan.

Pemerintahan sebagai gejala social, dapat terlihat dalam hubungan yang terjadi antar anggota masyarakat, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Adanya interaksi tersebut menyebabkan terjadinya dominasi satu kelompok dengan kelompok lainnya.

Ada beberapa penyebab terjadinya dominasi tersebut, antara lain :

1. Waktu, misalnya dominasi orang yang lebih tua terhadap yang lebih muda,
2. Lokasi, misalnya suatu daerah yang lebih kaya mendominasi yang lebih miskin,
3. Tradisi, misalnya kesetiaan orang terhadap nilai yang dianut secara turun temurun,
4. Penaklukan, misalnya dominasi kelompok penakluk terhadap kelompok yang ditaklukkan, baik dengan menggunakan kekuatan atau paksaan maupun melalui rekayasa,
5. Penyelesaian konflik melalui win lose atau lose win,
6. Perlombaan atau persaingan,
7. Kesepakatan,

Isjwara dalam ( Suryadi, 2007 ) menyebut bahwa kekuasaan adalah gejala social yang terdapat dalam pergaulan hidup. Kekuasaan adalah gejala antar individu, atau antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, atau antara Negara dengan Negara.. Oleh karenanya **kekuasaan sebagai gejala social menjadi sangat penting karena dua alasan pokok, yaitu :**

1. Kekuasaan bukan saja gejala social, tetapi sekaligus merupakan naluri individu sebagai makhluk hidup atau persoalan psikologis,
2. Adanya dilema antara kekacauan dan keamanan, artinya apabila manusia lebih mementingkan keamanan dalam hidupnya daripada kekacauan atau anarchy maka manusia harus menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan.

## **B. PENDEKATAN DALAM SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat akan dianalisa dan dikaji oleh berbagai ilmu dengan sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda tersebut menunjukkan adanya pengakuan akan keterbatasan yang dimiliki manusia untuk memahami fenomena social secara menyeluruh, sehingga wajarlah apabila dilakukan pembatasan-pembatasan.

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dalam sosiologi pemerintahan, yaitu :

1. Pendekatan Strukturalis- Fungsionalis,
2. Pendekatan Konflik,
3. Pendekatan Kelas,
4. Pendekatan Elit
5. Pendekatan Pluralis.

### **Ad. 1. PENDEKATAN STRUKTURALIS FUNGSIONALIS**

Tokoh-tokoh terkenal dari pendekatan ini adalah Talcot Parson, Herbert Spencer, Emile Durkheim.

Pendekatan ini mempunyai beberapa asumsi pokok, yaitu :

1. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu system dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain,
2. Hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian tersebut bersifat ganda dan timbale balik,
3. Sekalipun integrasi social tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental system social selalu cenderung bergerak kearah equilibrium yang bersifat dinamis, yakni menanggapi perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan tersebut berdampak minimal,
4. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan selalu terjadi, tetapi dalam jangka panjang keadaan tersebut akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Singkatnya, walaupun integrasi social pada tingkat yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap system social akan selalu berproses kearah itu,
5. Perubahan dalam system social pada umumnya terjadi secara gradual, melalui

- penyesuaian dan tidak secara revolusioner,
6. Pada dasarnya, perubahan social timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan, yakni **penyesuaian** yang dilakukan oleh system sosial tersebut terhadap perubahan yang datang dari luar, pertumbuhan melalui **diferensiasi structural dan fungsional** serta **penemuan baru** oleh masyarakat,
  7. Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan sistem social adalah **consensus** di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu.

## Ad. 2. PENDEKATAN KONFLIK

Tokoh yang terkenal dari pendekatan konflik ini adalah Ralf Dahrendorf dan Lewis Coser.

Pandangan atau pendekatan konflik, mempunyai beberapa asumsi dasar, yakni :

1. Setiap masyarakat selalu berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir, atau singkatnya perubahan social merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat,
2. Setiap masyarakat mengandung konflik- konflik dalam dirinya, singkatnya konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat,
3. Setiap unsure di dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan social,
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain.

Perubahan social, oleh penganut aliran ini tidak saja dipandang sebagai gejala yang melekat di dalam masyarakat, akan tetapi malah dianggap bersumber di dalam factor-faktor yang ada di dalam masyarakat. Perubahan timbul dari kenyataan adanya unsure yang saling bertentangan dalam masyarakat, yang bersumber pada kenyataan bahwa di dalam masyarakat mengenal pembagian kewenangan atau otoritas yang tidak merata, sehingga menimbulkan dua macam kategori social, yakni mereka yang mempunyai kekuasaan dan mereka yang tidak mempunyai otoritas. Pembagian otoritas yang tidak merata tersebut dianggap sebagai sumber konflik, karena di dalam dirinya sendiri menimbulkan kepentingan yang berlawanan satu sama lain.

### **Ad. 3. PENDEKATAN KELAS**

Tokoh dari pendekatan ini adalah Karl Marx.

Karl Marx dalam teori kelasnya mengatakan bahwa masyarakat selalu diwarnai adanya konflik. Bahwa konflik selalu terjadi di dalam masyarakat, yang didasarkan pada dua asumsi, yaitu ( 1 ) kegiatan ekonomi sebagai factor penentu utama semua kegiatan masyarakat ( 2 ) melihat masyarakat manusia dari sudut konflik di sepanjang sejarahnya. Marx memasukkan determinisme ekonomi sebagai basis struktur yang dalam proses relasi social dalam tubuh masyarakat akan menimbulkan konflik antar kelas atas dan kelas bawah. Konsep teori kelas menekankan perlunya perjuangan kelas, yakni perjuangan kaum ploretariat melawan kaum borjuis dalam usaha mengawasi sumber-sumber produksi. Dengan adanya pembedaan tersebut, menunjukkan adanya stratifikasi dalam masyarakat, yang secara kelas dan status keduanya adalah berbeda.

### **Ad. 4. PENDEKATAN ELIT**

Tokoh pendekatan ini adalah Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto dan Robert Michels.

Menurut Gaetano Mosca, dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai. Kelas pertama jumlahnya lebih sedikit, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas kedua, jumlahnya lebih besar, diatur dan dikendalikan oleh kelas pertama.

Ada beberapa asas umum yang dipakai dalam pendekatan elit, yaitu :

1. Kekuasaan politik, seperti halnya barang-barang social lainnya didistribusikan dengan tidak merata,
2. Pada hakekatnya, orang hanya dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang mempunyai kekuasaan politik “ penting “ dan mereka yang tidak memilikinya,
3. Secara internal, elit itu homogen, bersatu dan memiliki kesadaran kelompok,
4. Elit itu mengatur sendiri kelangsungan hidupnya dan keanggotaannya berasal dari suatu lapisan masyarakat yang sangat terbatas,

5. Kelompok elit itu pada hakekatnya bersifat otonom, kebal akan gugatan dari siapapun di luar kelompoknya mengenai keputusan-keputusan yang dibuatnya.

#### Ad. 5. **PENDEKATAN PLURALIS**

Tokoh aliran ini adalah Robert Dahl dan Suzanne Keller.

Pendekatan ini memandang bahwa masyarakat terdiri atas beraneka ragam kelompok. Proses interaksi yang terjadi antar kelompok tersebut relative tersebar. Masyarakat yang plural terdiri dari bermacam-macam kelompok kepentingan yang bersentimen primordial, karena itu perlu adanya tingkat **consensus** yang tinggi di dalam masyarakat untuk menghindarkan terjadinya konflik. Tanpa adanya kesadaran dan aksi konsesus atas persoalan kebangsaan, hanya akan menyulitkan proses manajemen konflik.

#### **C. PENDEKATAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN DAN ISSUE-ISSUE DALAM MASYARAKAT.**

Dari berbagai pendekatan yang ada di atas, dapat kita terapkan dalam menganalisa berbagai issue yang ada di dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kajian sosiologi pemerintahan, yakni masyarakat, negara, tertib sosial dan perubahannya, pelapisan masyarakat dan kekuasaan.

Pendekatan **Strukturalis Fungsionalis** memandang **masyarakat** sebagai suatu sistem social yang terdiri dari bagian-bagian, yakni unit-unit social, seperti lembaga-lembaga, kelompok, kelas dan organisasi yang saling tergantung dan terpadu. Struktur dan fungsi unit-unit social itu mengarah pada penciptaan keselarasan dan pemenuhan kebutuhan sistem sosial.

**Pendekatan konflik** memandang **masyarakat** bukan sebagai suatu sistem yang utuh, tetapi suatu sistem social yang penuh perbedaan, ketidaksepakatan dan konflik yang tak terhindarkan. Masyarakat disatupadukan bukan karena consensus tentang suatu nilai, tetapi oleh adanya daya paksa yang mengancam siapa saja yang hendak memecah belah.

**Pendekatan Kelas** memandang **masyarakat** sebagai tempat pertentangan dan perpecahan kepentingan, di mana akar dari pertentangan dan perpecahan kepentingan itu adalah factor ekonomi. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada fungsi ekonomi dalam masyarakat. Pertentangan akan terjadi di antara kelas borjuis dan kelas proletar.

**Pendekatan elit** memandang **masyarakat** sebagai suatu sistem yang terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok elit dan kelompok non elit. Kelompok elit mempunyai kedudukan yang spesifik dan akan menentukan dan mempengaruhi kelompok non elit. Ketergantungan non elit terhadap elit sangat besar.

**Pendekatan Pluralis** memandang bahwa di dalam **masyarakat** tidak ada kelompok elit yang menguasai semuanya. Tidak ada satupun kelompok dalam masyarakat yang mampu mendominasi kelompok yang lain.

**Negara** sebagai salah satu kajian dalam sosiologi pemerintahan akan dapat dimaknai melalui berbagai pendekatan di atas.

**Pendekatan Strukturalis Fungsionalis** memandang **negara** sebagai suatu sistem yang mempunyai fungsi memelihara, mengatur dan mempersatukan berbagai komponen yang ada di dalamnya dalam mencapai tujuan bersama. Tindakan yang dilakukan oleh negara mempunyai sifat mengikat bagi masyarakat.

**Pendekatan Konflik** memandang **negara** sebagai alat penguasa dan pemaksa yang dipakai oleh kelas penguasa agar masyarakat dapat mematuhi segala aturan yang dibuatnya.

**Pendekatan kelas** memandang **negara** sebagai sarana kekerasan yang terorganisir yang didominasi oleh satu kelas social, yakni kelas kapitalis.

**Pendekatan elite** memandang **negara** sebagai organ atau mekanisme yang dikuasai sekelompok minoritas yakni kaum elit yang menjalankan fungsi negara demi kepentingannya sendiri atau kepentingan pendukungnya.

**Pendekatan Pluralis** memandang **negara** hanya merupakan salah satu dari banyak lembaga politik yang ada di dalam masyarakat. Negara mewakili kepentingan banyak kelompok, sehingga bersifat demokratis.

Issue lain yang ada di dalam masyarakat yang bisa dianalisis dengan pendekatan sosiologi adalah **tertib social dan perubahannya**.



**Pendekatan Strukturalis Fungsionalis** memandang masyarakat sebagai sesuatu yang statis, selalu mengutamakan integrasi, ketertiban dan stabilitas, walaupun berubah, perubahan itu berwujud penyesuaian terhadap lingkungannya.

**Pendekatan konflik** memandang masyarakat selalu diliputi **perubahan** dan **pertikaian**. Konflik tersebut merupakan kekuatan masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya.

**Pendekatan kelas** memandang **perubahan social** sebagai dinamika masyarakat yang tidak dapat dielakkan.

**Pendekatan elit** memandang **ketertiban dan status quo** sangat diperlukan dan perubahan social merupakan sesuatu yang mengancam eksistensi masyarakat sehingga perubahan tersebut harus dituntun oleh elit. Perubahan yang terjadi diharapkan hanya sekedar pergantian elit saja.

**Pendekatan Pluralis** memandang **perubahan masyarakat** terjadi secara bertahap yang disebabkan konflik diantara kelompok yang saling bersaing, namun masih dalam tertib kelembagaan sehingga tidak sampai mengganggu kestabilan.

**Ketimpangan atau pelapisan masyarakat** sebagai salah satu gejala yang dipelajari sosiologi pemerintahan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan yang ada.

**Pendekatan Strukturalis Fungsionalis** memandang **pelapisan social** sebagai suatu gejala yang diperlukan sebagai sistem integrative untuk memelihara tertib dan stabilitas social. Pemberian penghargaan dilakukan untuk menjamin bahwa hanya orang yang berprestasi saja yang menduduki jabatan penting.

**Pendekatan Konflik** memandang **perubahan social** merupakan penghalang terjadinya integrasi dan merupakan sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat. Pelapisan social terjadi karena terbatasnya dan tidak meratanya distribusi sumber dalam masyarakat.

**Pendekatan Kelas** memandang **pelapisan social** sebagai penyebab konflik yang bisa dihilangkan.

**Pendekatan Pluralis** memandang pelapisan social sebagai suatu fenomena yang pasti ada dalam masyarakat, namun pengaruh dan keuntungan yang ada didistribusikan secara merata.

Pendekatan dalam Sosiologi Pemerintahan juga dimanfaatkan untuk menganalisa **gejala kekuasaan** yang ada dalam masyarakat.

Kekuasaan dipandang oleh pendekatan **Strukturalis Fungsionalis** sebagai media yang sah untuk mempertukarkan dan memobilisasi sumber daya politik dalam sistem politik demi mencapai tujuan bersama.

**Pendekatan Konflik** memandang kekuasaan sebagai mekanisme yang tidak sah dan cenderung menguntungkan sekelompok kecil orang yang mendominasi masyarakat dengan merugikan sebagian besar anggota masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaan dipandang oleh pendekatan **Kelas** bersifat terpusat di tangan para pemilik alat-alat produksi, yaitu kelas penguasa.

Pendekatan **Elit** memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat terpusat di tangan mereka yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur social. Kekuasaan adalah persekongkolan kepentingan dari lembaga yang ada dalam masyarakat.

Pendekatan **Pluralis** memandang kekuasaan bersifat polisentris dan tersebar di antara berbagai kelompok kepentingan, tidak ada satu kelompokpun yang memonopoli kekuasaan.

-----

## **RINGKASAN**

Masyarakat sebagai sebuah gejala social merupakan sekumpulan orang yang membutuhkan beberapa pilar sebagai penyangga keberadaannya. Adanya masyarakat menumbuhkan kekuasaan yang berintikan saling pengaruh mempengaruhi dalam proses interaksi. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat, oleh sosiologi pemerintahan dapat didekati dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Strukturalis Fungsionalis, pendekatan konflik, pendekatan kelas, pendekatan elit dan pendekatan pluralis. Kelima pendekatan itu dapat dipakai untuk menganalisa issue-issue yang ada di masyarakat berkaitan dengan negara, masyarakat, perubahan social, pelapisan social dan kekuasaan.

## **EVALUASI**

1. Jelaskan pilar-pilar yang menyangga terjadinya masyarakat ?
2. Jelaskan bagaimana pendekatan Strukturalis Fungsionalis dipakai dalam menganalisa negara ?
3. Jelaskan bagaimana pendekatan Kelas dipakai untuk menganalisa perubahan social ?
4. Jelaskan bagaimana pendekatan Pluralis dipakai untuk menganalisa kekuasaan ?
5. Jelaskan bagaimana pendekatan elit dipakai dalam menganalisa masyarakat ?

## **REFERENSI**

1. Rina Martini, dkk, Sosiologi pemerintahan, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
2. Suryadi, Budi, Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan perkembangan konsep, penerbit IRCiSoD, Yogyakarta, 2007,
3. Mas' oed, Mochtar, Colin Mac Andrews, Perbandingan Sistem Politik, Penerbit Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1984
4. Gatara, Said dan Dzulkiah Said, Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007.

## **B A B III**

### **PEMERINTAHAN DAN CIVIL SOCIETY**

#### **Tujuan Pembelajaran :**

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa memahami dan mengerti salah satu kajian sosiologi pemerintahan, yakni pemerintahan dan civil society, yang di dalamnya membahas tentang fungsi pemerintah, aktor-aktor dalam sosiologi pemerintahan dan civil society yang nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana setiap hari anda menyaksikan orang-orang berpacu dengan waktu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada berbagai kebutuhan yang dapat dipenuhi sendiri, ada yang harus membutuhkan orang lain, bahkan ada kebutuhan yang hanya bisa dicukupi pemerintah. Disinilah kita akan memahami bahwa seburuk apapun yang kita katakan, pemerintah tetap dibutuhkan keberadaannya. Seiring dengan perjalanan waktu, anda sering menjumpai fenomena di mana masyarakat merasa tidak lagi membutuhkan atau tergantung sepenuhnya kepada pemerintah, mereka merasa dapat memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan dapat berperan sebagai penyeimbang pemerintah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pada saat sekarang kemunculan masyarakat madani atau civil society bukan lagi merupakan sesuatu yang harus dilawan, namun menjadi dambaan bagi sebuah negara.

#### **A. FUNGSI PEMERINTAH DALAM NEGARA DEMOKRASI**

**Thomas Hobbes** dalam bukunya *Leviathan* mengatakan bahwa pada awalnya, kehidupan manusia dipenuhi dengan rasa ketakutan, hanya mereka yang kuatlah yang bisa bertahan, sehingga hukum rimba menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam keadaan yang demikian, kekacauan terjadi di mana-mana, ketertiban social hanya merupakan impian belaka. Seiring dengan peradaban manusia, muncullah sekelompok orang yang mempunyai pemikiran pentingnya tertib social dalam hidup

bermasyarakat. Fenomena tersebut dapat kita pakai sebagai acuan bagi terbentuknya sebuah pemerintahan. Bentuk awal dari pemerintahan dapat bermacam-macam, namun ciri pokok yang menyertainya setelah tercapainya kesepakatan aturan adalah kehadiran seorang pemimpin yang ditaati, secara tulus maupun terpaksa oleh masyarakatnya.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban, dimana masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukan untuk melayani dirinya sendiri, namun untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat mengembangkan diri dan kemampuannya demi mencapai tujuan bersama. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan **Ryaas Rasyid**, bahwa fungsi utama pemerintah adalah :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam,
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokan antar warga masyarakat, sehingga perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara damai,
3. Menjamin dilaksanakannya keadilan dalam masyarakat,
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang yang tidak mungkin dilakukan oleh lembaga non pemerintah,
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat,
7. Menerapkan kebijakan pemerliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dari berbagai fungsi yang ada di atas, sebenarnya dapat dikelompokkan ke dalam fungsi **pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan**. Untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Pelayanan akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan mewujudkan kemakmuran, yang semuanya menjadi tujuan sekaligus misi pemerintah di tengah masyarakat.

Pemerintah sebagai lembaga resmi yang bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan Negara, harus mempunyai kewenangan yang legitimate. Kewenangan yang dimiliki pemerintah dapat berasal dari berbagai sumber. Surbakti mengatakan, bahwa sumber kekuasaan berasal dari:

1. Tradisi, yakni kepercayaan yang telah berakar dan dipelihara terus menerus dalam masyarakat,
2. Tuhan, Dewa atau Wahyu, sehingga hak memerintah dianggap sacral,
3. Kualitas pribadi sang pemimpin,
4. Peraturan perundangan yang berlaku,
5. Sumber yang bersifat instrumental, seperti keahlian dan kekayaan.

Menurut Max Weber ( dalam Budiardjo, 1984 : 14 ) wewenang ada tiga macam, yaitu :

1. Wewenang Tradisionil, berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu, adalah wajar dan patut dihormati,
2. Wewenang Kharismatik, yakni berdasarkan kepercayaan masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religious seorang pemimpin,
3. Wewenang Rasional legal, berdasarkan kepercayaan masyarakat pada tatanan hokum rasional yang melandasi kedudukan seseorang pemimpin.

## **B. AKTOR-AKTOR DALAM SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Di era globalisasi sekarang ini, yang ditandai dengan tuntutan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mau tidak mau pemerintah harus merubah paradigma, di mana sebelumnya sebagai pelayan, harus berubah menjadi fasilitator. Fungsi pelayanan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah, atau dengan kata lain pemerintah bukan satu-satunya pusat pelayanan public. Hal ini juga dilandasi adanya keterbatasan yang dimiliki pemerintah, baik dari segi financial, sumber daya manusia maupun waktu. Pelibatan potensi yang ada dimasyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan akan mempercepat pencapaian tujuan Negara dan mewujudkan good governance. Pada saat ini, ada tiga komponen yang dapat memberikan pelayanan public, yaitu sector pemerintah, sector bisnis dan organisasi nirlaba. Semakin berkembangnya model partnership ini akan memunculkan tuntutan akan kemampuan berwirausaha dalam pelayanan publik, sebagaimana telah dicetuskan oleh David Osborne dan Ted Gaebler. Masing-masing komponen tersebut mempunyai tugas yang spesifik. Perbedaan fungsi dari ketiga komponen tersebut, dapat dilihat dalam table di bawah :

ORGANISASI PUBLIK	ORGANISASI BISNIS	ORGANISASI NIRLABA
1. Manajemen kebijakan 2. Regulasi 3. Pelaksanaan keadilan 4. Pencegahan diskriminasi 5. Pencegahan eksploitasi 6. Peningkatan keakraban sosial	1. Tugas Ekonomi 2. Tugas investasi 3. Pendatanganan keuntungan 4. Peningkatan kecukupan sendiri	1. Tugas social 2. Tugas yang membutuhkan tenaga sukarela 3. Tugas yang mendatangkan laba sedikit 4. Peningkatan tanggung jawab individu 5. Peningkatan kelompok masyarakat 6. Peningkatan komitmen terhadap kesejahteraan orang lain.

Fungsi-fungsi yang ada di atas, bisa saja dilaksanakan semua oleh pemerintah, namun pengalaman menunjukkan bahwa hasil yang dicapai akan lebih baik manakala dilaksanakan oleh lembaga yang tepat. Dengan pemahaman yang demikian, peran pemerintah mulai dibatasi, fungsi yang tidak seharusnya dilakukan pemerintah didistribusikan kepada lembaga lain yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jenis organisasinya. Menurut Samuelson ( dalam Suhirman, 2002 : 80 ), fungsi pemerintah yang tidak dapat digantikan oleh institusi lain adalah :

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi,
2. Mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan,
3. Stabilisasi ekonomi melalui kebijakan ekonomi makro dan
4. Mewakili Negara secara internasional.

Pengalihan fungsi pemerintah tersebut, bukan berarti mengurangi tugas pokok yang dilakukan pemerintah, namun tetap terlibat sebagai fasilitator. Pemerintah bertanggungjawab membuat regulasi agar pelaksanaan fungsi oleh lembaga lain dapat berjalan maksimal. Dengan demikian pemerintah hanya berkonsentrasi pada masalah yang bersifat makro dan strategis.

Peran yang selama ini dimonopoli pemerintah, sudah saatnyalah diserahkan kepada masyarakat, sehingga yang diperlukan adalah konsep pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah harus menyediakan cukup ruang untuk organisasi baik bisnis maupun nirlaba berkiprah untuk turut serta mewujudkan cita-cita bangsa. Adanya aliansi antara pemerintah, organisasi bisnis dan organisasi nirlaba dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan mewujudkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme penyelenggaraan pelayanan.

### **C. CIVIL SOCIETY ( MASYARAKAT SIPIL )**

Sebagaimana dijelaskan di muka, seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat, membawa konsekuensi munculnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya kekuasaan, yang pada gilirannya akan terbentuklah kutub-kutub baru sebagai akibat dari semakin lemahnya ketergantungan ekonomi, sosial dan peradaban masyarakat kepada kekuasaan formal. Disinilah kemudian muncul masyarakat madani ( civil society ). Masyarakat madani merujuk posisi masyarakat yang kuat berhadapan dengan Negara. Di samping kemandirian, konsep masyarakat madani bercirikan pluralism, di mana berbagai kelompok dalam masyarakat yang berbeda bisa bekerjasama dan hidup secara damai. Masyarakat madani juga tunduk pada hukum dan menempatkan anggotanya dalam kedudukan yang sama di depan hukum. Menurut de Tocquville ( dalam Suryadi, 2007 : 148 ) civil society adalah wilayah-wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan **bercirikan antara lain** : nilai-nilai individualisme, kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan. Masyarakat madani ( civil society ) dapat berbentuk atau mewujudkan menjadi lembaga-lembaga non pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi social dan keagamaan, perkumpulan atau paguyuban, kelompok-kelompok yang memiliki kemandirian terhadap kekuasaan dan kepentingan negara.

Menurut Muqaddas ( dalam Taufik Abdullah dkk, 1999 :166 ) disebutkan beberapa elemen dari masyarakat madani, yaitu :

1. Terdapatnya komitmen social yang dibangun atas dasar kesadaran makna dan fungsi perubahan,
2. Terdapatnya lembaga-lembaga non pemerintah atau LSM, yang memiliki



ciri kepribadian bebas, mandiri dan mampu berperan sebagai agen perubahan di berbagai segi kehidupan,

3. Aktivis yang memiliki komitmen, visi dan keterpanggilan secara ideologi yang secara full timer dan professional bersedia mengorbankan dirinya sebagai relawan dalam proses penguatan pilar masyarakat madani.

Munculnya Civil Society ini akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang mana berakibat pada meningkatnya posisi tawar. Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci agar masyarakat mempunyai posisi tawar yang tinggi terhadap pemerintah. Untuk itu mereka mengorganisir diri baik dalam kelompok kepentingan maupun partai politik. Bangkitnya masyarakat madani mengindikasikan adanya demokratisasi. Pemerintahan yang demokratis bermakna pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga pemerintahan harus banyak melibatkan rakyat dan hasilnya banyak dinikmati rakyat. Kondisi yang demikian membutuhkan Sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Fathurrohman dan Sobri dalam ( Suryadi, 2007 : 148 ), untuk mengidentifikasi konsep masyarakat madani dalam suatu masyarakat, dapat mengacu pada beberapa faktor yang ada, yaitu :

1. Sifat partisipatif. Masyarakat madani tidak akan menyerahkan seluruh nasibnya pada negara, tetapi mereka menyadari bahwa yang akan dominan menentukan masa depan mereka haruslah berasal dari diri sendiri. Stimulus dari negara bukanlah penentu aktivitas dan program kemajuan masyarakat ke depan, tetapi harus kekuatan masyarakatlah yang mewarnainya, sehingga apapun konsekuensi dari setiap kebijakan, program aksi atas nama negara selalu terdapat warna keinginan masyarakat madani di dalamnya. Dalam tatanan praktis, masyarakat madani dapat terlibat di berbagai bidang yang akan dilakukan negara.
2. Otonom. Masyarakat madani mempunyai karakter mandiri, yaitu dalam mengembangkan dirinya tidak tergantung dan tidak menunggu bantuan negara. Masyarakat terbiasa dengan inisiatifnya mampu berinovasi, sekaligus independent secara politik dan ekonomi.
3. Tidak bebas nilai. Seluruh komponen masyarakat madani, memiliki keterikatan terhadap nilai-nilai, yang merupakan hasil musyawarah demokratis, dimana

terimplementasi dalam tindakannya yang tidak merugikan masyarakat dan berimplikasi positif.

4. Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non dominatif. Meskipun eksistensinya yang partisipatif dan otonom terhadap kekuatan negara, namun masyarakat madani adalah bagian dari komponen negara.
5. Termanifestasi dalam organisasi. Prinsip-prinsip organisasi dipegang oleh masyarakat madani sebagai perwujudan identitasnya secara material. Artinya, masyarakat madani bukan merupakan individu-individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri dari sekumpulan individu warganegara yang tergabung dalam asosiasi yang memiliki tatanan yang mampu menjamin anggotanya untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konsisten.

Selain itu, menurut Diamond dalam (Suryadi, 2007 : 150 ), civil society memberikan kontribusi yang besar bagi tumbuhnya demokrasi, yaitu :

1. Menyediakan wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk menjaga dan mengawasi negara,
2. Beragam dan pluralnya masyarakat dengan berbagai kepentingannya, yang apabila diorganisir dan terkelola dengan baik, maka akan menjadi dasar yang penting bagi kompetisi dan persaingan,
3. Memperkaya peranan-peranan partai politik dalam hal partisipasi politik, meningkatkan efektifitas politik dan meningkatkan kesadaran kewarganegaraan,
4. Menjaga stabilitas negara dalam arti mengontrol peran negara,
5. Sebagai wadah bagi seleksi dan lahirnya para pemimpin politik yang baru,
6. Menghalangi dominasi rezim otoriter.

-----

## **RINGKASAN**

Fungsi pemerintah dalam negara demokrasi adalah menciptakan ketertiban yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan diri dan kemampuannya. Seiring

dengan dinamika masyarakat, pemerintah tidak lagi bisa mengklaim dirinya sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melayani semua kebutuhan masyarakat, karena keterbatasan yang ada pada pemerintah. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara unsure-unsur yang ada di masyarakat, yakni pemerintah, organisasi bisnis dan organisasi nirlaba dalam upaya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah mempunyai peran yang bersifat regulative dan komponen yang lain menjalankan fungsi masing-masing untuk mendukung terlaksananya regulasi tersebut. Perkembangan masyarakat yang semakin pesat, baik di bidang pendidikan maupun ekonomi menimbulkan kesadaran baru akan pentingnya masyarakat madani dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai penyeimbang untuk mewujudkan demokratisasi. Keberadaan masyarakat madani pada hakekatnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat agar mempunyai posisi tawar yang tinggi terhadap pemerintah.

## **EVALUASI**

1. Jelaskan fungsi pemerintah menurut Ryaas Rasyid ?
2. Jelaskan sumber-sumber kekuasaan menurut Ramlan Surbakti ?
3. Jelaskan actor-aktor dalam pemerintahan ?
4. Jelaskan perbedaan antara pemerintah, organisasi bisnis dan organisasi nirlaba dalam penyelenggaraan pemerintahan ?

## **REFERENSI**

1. Rina Martini, dkk, Sosiologi pemerintahan, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
2. Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi ( Edisi II ), Jakarta, FE- UI, 2000
3. Suhirman, Desentralisasi dan Ekonomi Politik Perizinan : mengambil hak yang terampas, Jurnal Analisis Sosial Vol. 7 No. 2, Juni 2004
4. Rasyid, M. Ryaas, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya, 2000,
5. Surbakti, Ramlan, memahami Ilmu Politik, Jakarta, Grasindo, 1992
6. Abdullah, taufik, dkk, Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia

Baru Milenium Ke 3, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah  
Malang, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.

## **B A B IV**

### **KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DALAM PEMERINTAHAN**

#### **TUJUAN PEMBELAJARAN :**

Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep kekuasaan dan kewenangan yang ada di masyarakat secara komprehensif, sehingga nantinya dapat menganalisa fenomena-fenomena yang menyertai setiap kekuasaan.

#### **PENDAHULUAN**

Konsep kekuasaan dan kewenangan selalu menyertai keberadaan pemerintah. Hal tersebut dapat anda buktikan dari berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya bagaimana pemerintah dapat memaksakan berlakunya kebijakan dan memberi sanksi bagi para pelanggarnya. Kekuasaan yang ada di masyarakat terjadi karena adanya ketidaksamaan dalam distribusi sumber-sumber, misalnya kekayaan, penghasilan, pendidikan dan sebagainya. Kekuasaan bagaimanapun juga tidak hanya ada dalam konteks social, tetapi lebih dari itu kekuasaan merupakan suatu yang fundamental , mengikat dalam jenis interaksi manusia di level masyarakat. Dalam setiap kekuasaan akan melekat kewenangan, di mana kewenangan tersebut berasal dari berbagai sumber.

#### **A. KEKUASAAN**

##### **A. 1. Pengertian Kekuasaan Sosial**

Kekuasaan merupakan gejala yang selalu ada dalam masyarakat manapun baik yang masih bersahaja, maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Walaupun ada kekuasaan, namun tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata itulah timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Jadi kekuasaan dapat diartikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang, sehingga dapat merupakan konsep kuantitatif, karena dapat dihitung hasilnya, misalnya berapa banyaknya orang yang dapat dikuasai, berapa harta yang dapat dikumpulkannya dan sebagainya.

Sebenarnya konsep kekuasaan mengandung kerumitan untuk mendefinisikannya secara mutlak, karena adanya hubungan social atau politik yang sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah.

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan kekuasaan, antara lain :

a. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan

Kekuasaan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan.

b. Max Weber

Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam hubungan social, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini.

c. Van Doorn

Kekuasaan adalah kemungkinan untuk membatasi alternatif-alternatif bertindak dari seseorang atau kelompok sesuai dengan tujuan dari pihak pertama

d. Miriam Budhiardjo

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

e. Talcott Parsons

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan kolektif dengan jalan membuat keputusan-keputusan yang mengikat, yang jika mengalami perlawanan, dapat didukung dengan sanksi negative.

f. Ossip K. Flechtheim

Kekuasaan social adalah keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain.... Untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.

g. Robert M. Iver

Kekuasaan social adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan jalan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia..

Dari berbagai rumusan tentang kekuasaan, Surbakti ( 1992 : 58 ) berpendapat bahwa dalam setiap situasi terdapat hubungan kekuasaan, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia,
2. Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain,
3. Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi ataupun pemerintah ( negara dalam hubungan luar negeri ),
4. Sasaran kekuasaan ( yang dipengaruhi ) dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah ( negara ),
5. Satu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan, karena tergantung pada kemampuannya menggunakan sumber-sumber kekuasaan secara efektif,
6. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, consensus, atau kombinasi keduanya,
7. Hal ini tergantung pada perspektif moral yang digunakan, apakah tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk ?
8. Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat,
9. Pada umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan pribadi cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat,
10. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik.

Sedangkan menurut Budiardjo ( 1983 : 35 ), sebuah kekuasaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kekuasaan selalu menunjuk pada hubungan social antara paling sedikit dua orang, dan cenderung untuk mengacu pada ciri-ciri hubungan tersebut daripada ciri-ciri orangnya,
2. Penetapan kekuasaan didasarkan pada kemampuan untuk melaksanakan sanksi-sanksi negative, apabila terjadi ketidakpatuhan. Hal ini bukan berarti bahwa adanya ancaman sanksi negative menjamin adanya kepatuhan. Artinya, bahwa pengikut mempunyai pilihan untuk patuh atau menanggung resiko dijatuhi hukuman,
3. Kekuasaan senantiasa menyangkut hubungan asimetris, walaupun perlu adanya tekanan terhadap adanya asas resiprositas. Adanya ketidaksamarataan merupakan unsure relevan, yang didasarkan pada ketidaksamaan sumber-sumber yang menjadi dasar dari hubungan kekuasaan antara para pihak.

Menurut Budiardjo ( 1984 : 13 ), ada beberapa sumber kekuasaan, yaitu :

1. Kedudukan,
2. Kekayaan,
3. Kepercayaan atau agama,
4. Hubungan kerabat,
5. Kepandaian atau ketrampilan.

Sedangkan menurut JRP. French dan Bertram Raven ( dalam Syafiie, 2005 : 105 ), ada beberapa cara mengapa seseorang atau sekelompok orang mempunyai kekuasaan, yaitu :

1. Legitimate Power, yakni karena pengangkatan,
2. Coersive Power, yakni karena kekerasan,
3. Expert Power, yakni karena keahlian,
4. Reward Power, yakni karena pemberian,
5. Reverent Power, karena daya tarik.

Lain lagi pendapat Soekanto ( dalam Martini, 2007 ) yang menyatakan beberapa sumber yang dapat dijadikan kekuasaan, antara lain :

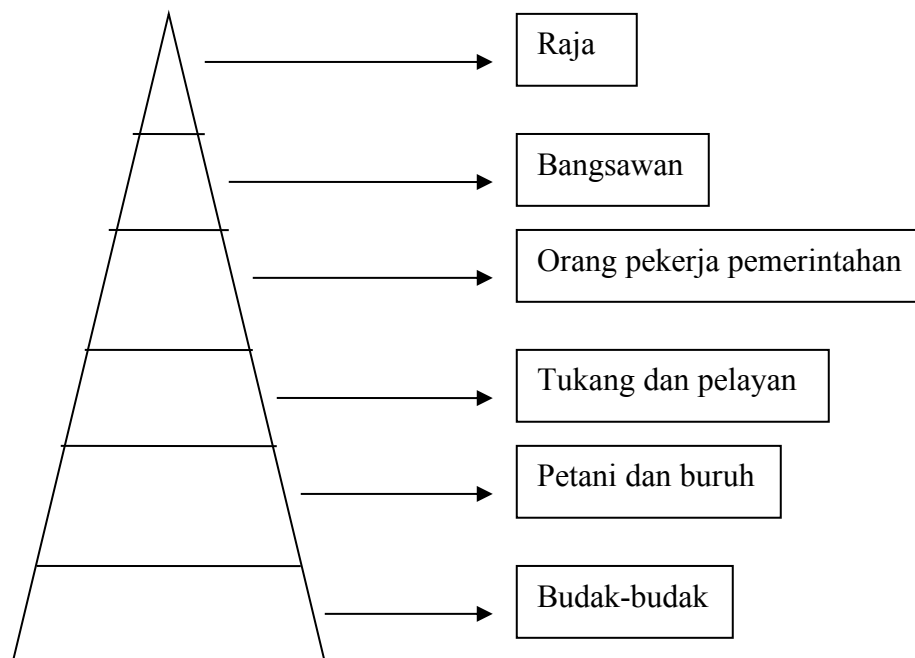
1. Pengendalian terhadap sarana-sarana financial,
2. Pengendalian terhadap sarana-sarana pemaksaan,
3. Hak istimewa untuk mendapat pengetahuan dan ilmu,



4. Monopoli penguasaan saluran ke lingkungan kekuasaan tertinggi,
5. Kemampuan di bidang niaga, dan
6. Penguasaan terhadap sarana-sarana produksi dan distribusi.

Kekuasaan yang ada di dalam masyarakat, menurut Mac Iver ( 1985 : 110 – 119 ) berbentuk piramida, yakni bahwa golongan yang berkuasa selalu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan golongan yang dikuasai, hal ini disebabkan karena pada dasarnya hanya sedikit orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan kebanyakan orang, dan membuktikan bahwa kekuasaan yang ada karena lebih unggul dari yang lain, yang berarti yang satu lebih kuat dengan jalan mensubordinasi kekuasaan lainnya itu. Menurutnya, piramida kekuasaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga pola atau pelapisan, yaitu :

1. Tipe Kasta, adalah sistem pelapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisahan yang tegas dan kaku. Tipe ini ditemukan dalam masyarakat yang menganut sistem kasta, dimana garis pemisah antara satu lapisan dengan lapisan lainnya sangat tegas. Gambar di bawah akan memperjelas tipe ini



Pada puncak piramida tersebut, adalah penguasa yang tertinggi, dapat berupa raja atau sebutan lainnya , yang didukung oleh kaum bangsawan, tentara dan pendeta. Lapisan ke dua terdiri dari para petani dan buruh tani yang kemudian

diikuti oleh lapisan terendah dalam masyarakat yang terdiri dari para budak. Di Indonesia tipe ini terdapat di Bali.

2. Tipe Oligarkis, adalah tipe yang garis-garis kekuasaan masih memisahkan dengan kuat tingkat yang satu dengan yang lainnya, namun terbuka kesempatan bagi warga masyarakat untuk memperoleh kekuasaan tertentu,
3. Tipe Demokratis, adalah tipe yang menunjukkan kenyataan akan adanya garis-garis pemisah yang sangat terbuka, dengan ditentukan oleh kemampuan dan factor keberuntungan.

Bentuk piramida kekuasaan social ini terus mengalami adaptasi, sesuai dengan perkembangan di masyarakat. Artinya bentuk piramida kekuasaannya tetap ada atau tidak hilang karena perubahan masyarakat, namun yang berubah hanyalah symbol komponen kekuasaan itu, misalnya pada masyarakat modern, piramida kekuasaan lebih beragam dan diisi oleh komponen-komponen individu berdasarkan kekuasaan materi dan kekuasaan legal formal ( pemerintah ).

## **A. 2. Kekuasaan Politik**

Kekuasaan politik pada dasarnya merupakan bagian dari kekuasaan social. Namun pada saat sekarang , kekuasaan politik menempati urutan yang terpenting, karena sudah menjadi kebutuhan di masyarakat modern. Menurut Budiardjo ( dalam Suryadi, 2007 : 55 ), kekuasaan politik sering diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi kebijaksanaan umum pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibat yang sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.

Kekuasaan politik mempunyai focus negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang dan mempunyai hak untuk mengendalikan tingkah laku social dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak hanya mencakup kekuasaan untuk memperoleh ketaatan dari masyarakat, tetapi juga menyangkut pengendalian orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan dan aktivitas negara di bidang administrasi, legislative dan yudikatif.

Flechtheim dalam ( Budiardjo, 1982 : 38 ) membedakan dua macam kekuasaan politik, yaitu :

1. Bagian dari kekuasaan social yang khususnya terwujud dalam negara

( kekuasaan negara atau state power ), seperti lembaga-lembaga pemerintahan, DPR, Presiden, dan sebagainya,

2. Bagian dari kekuasaan social yang ditujukan kepada negara, yakni aliran dan asosiasi , baik yang terang bersifat politik, misalnya partai politik maupun yang pada dasarnya tidak, terutama menyelenggarakan kegiatan politik, tetapi pada saat tertentu mempengaruhi jalannya pemerintahan, yaitu organisasi ekonomi, organisasi mahasiswa, organisasi agama, dan sebagainya.

Dalam perspektif yang lebih luas, menurut Surbakti ( 1992 : 59 -63 ), untuk memahami gejala politik dalam perspektif kekuasaan secara tuntas, maka kekuasaan ditinjau dari enam dimensi, yaitu :

1. Potensial dan actual. Seorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial, apabila dia mempunyai sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status social yang tinggi, massa yang terorganisasi dan jabatan. Sebaliknya seorang dipandang mempunyai kekuasaan actual, apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif untuk mencapai tujuannya. Misalnya seorang pengusaha mempengaruhi pembuatan kebijakan politik.
2. Konsensus dan Paksaan. Dalam menganalisa hubungan kekuasaan, seseorang harus membedakan kekuasaan yang berdasarkan consensus dengan kekuasaan yang berdasarkan paksaan. Penganalisis politik yang menekankan aspek consensus dari kekuasaan akan memandang elit politik sebagai seorang yang sedang berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya penganalisis politik yang menekankan aspek paksaan dari kekuasaan akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi dan konflik. Mereka melihat tujuan yang ingin dicapai elit politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan, tetapi semata-mata kebutuhan elit.
3. Positif dan negatif. Kekuasaan positif dimaksudkan dengan penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negative adalah penggunaan sumber-sumber

kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya.

4. Jabatan dan pribadi. Pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya pada masyarakat yang sederhana, struktur kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi nampak lebih menonjol daripada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. Efektifitas kekuasaannya terutama berasal dari kualitas pribadi, misalnya charisma, penampilan diri, asal usul keluarga, dan wahyu.
5. Implisit dan eksplisit. Kekuasaan implicit adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan. Adanya kekuasaan implicit ini menimbulkan perhatian orang pada segi rumit hubungan kekuasaan yang disebut “ asas memperkirakan reaksi pihak lain “. Asas ini biasanya dipakai oleh penguasa politik sebelum melakukan tindakan politik.
6. Langsung dan tidak langsung. Kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, tanpa melalui perantara. Sementara itu kekuasaan tidak langsung adalah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana kebijakan politik.

### **A.3. Distribusi Kekuasaan**

Para ilmuwan politik dalam menganalisa kekuasaan sering mengkaitkan dengan bagaimana menciptakan suatu sistem politik yang mampu mendistribusikan sumber-sumber secara relative merata pada semua individu atau kelompok. Menurut Andrian ( dalam Surbakti, 1992 : 74-80 ) ada tiga model distribusi kekuasaan, yaitu :

1. Model elit yang memerintah.

Gaetano Mosca ( dalam Surbakti, 1992 : 75 ) melukiskan bahwa setiap masyarakat terdapat dua kelas yang menonjol, yakni kelas yang memerintah, terdiri dari sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati

keuntungan yang ditimbulkan dari kekuasaan; dan kelas yang diperintah, berjumlah lebih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang lebih berdasarkan hukum, semesta dan paksaan. Asumsi dari model ini adalah ( a ) dalam setiap masyarakat tidak pernah terdapat distribusi kekuasaan secara merata ( b ) jumlah orang yang memerintah selalu lebih sedikit dari yang diperintah ( c ) di antara elit politik terdapat kesamaan nilai dan berusaha mempertahankan nilai-nilai tersebut, yang berarti mempertahankan status sebagai elit.

Model ini mempunyai kelemahan adalah mengabaikan pengaruh khalayak terhadap golongan elit, padahal elit yang memerintah sebagian besar dipilih oleh rakyat secara langsung melalui prosedur dan mekanisme yang demokratis.

## 2. Model Pluralis

Asumsi yang mendasari model ini adalah bahwa setiap individu dalam kehidupannya biasanya menjadi anggota satu atau lebih kelompok social tertentu sesuai dengan aspirasi dan kepentingan yang bersifat cultural dan ideologis maupun yang berdasarkan pekerjaan dan profesi. Kelompok kepentingan ini berfungsi sebagai wadah memperjuangkan kepentingan anggotanya dan menjadi perantara antara anggota dan pemerintah selaku pembuat kebijakan public.

Kelompok social dan kelompok kepentingan ini berupaya mempertahankan karakteristik dan otonominya dari pengaruh organisasi lain maupun pemerintah. Oleh karenanya, menurut model ini, kekuasaan dalam masyarakat akan terdistribusikan secara relative merata di antara berbagai organisasi dan kelompok kepentingan. Peranan pemerintah adalah sebagai sarana persaingan dan kompromi di antara berbagai organisasi dan kelompok kepentingan sebagai pihak yang merumuskan dan mengawasi aturan main agar persaingan tidak merusak kesatuan masyarakat dan sebagai pihak yang mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik. Keseimbangan kekuasaan tidak cukup hanya terjadi diantara kelompok social yang ada, namun juga harus terwujud dalam lembaga-lembaga pemerintah, yakni eksekutif, legislative dan yudikatif. Kelemahan dari model ini adalah hanya memandang pemerintah sebagai sarana menciptakan harmoni diantara kelompok social yang ada, padahal

pemerintah sebagai lembaga atau kumpulan elit mempunyai kepentingan sendiri. Pemerintah sebagai lembaga mempunyai kepentingan yang harus diterjemahkan ke dalam keputusan politik. Sebagai kumpulan dari elit politik, pemerintahan dikelola oleh orang yang jelas memiliki kepentingan sendiri yang tidak selalu selaras dengan kepentingan pemerintah, dan seringkali sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh kelompok social. Selain mengabaikan kepentingan lembaga pemerintah, kelemahan model ini adalah kurang mempertimbangkan peranan penting yang dimainkan oleh pemimpin kekuatan social yang ada.

### 3. Model Populis atau Kerakyatan

Asumsi yang mendasari model ini adalah demokrasi, artinya partisipasi individu dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik yang jelas akan mempengaruhi sendi kehidupan individu maupun masyarakat. Demokrasi menghendaki partisipasi rakyat dalam mengalokasikan dan mendistribusikan nilai-nilai kepada masyarakat. Selain demokrasi ada asumsi lain yang mendasari model kerakyatan dalam arti individual, yakni ( a ) Setiap warganegara yang telah dewasa secara potensial memiliki kekuasaan politik seperti hak memilih dalam pemilu, ( b ) Setiap warganegara yang dewasa mempunyai perhatian dan minat yang besar terhadap proses politik, karena setiap warga mempunyai motivasi yang kuat untuk aktif dalam proses politik, ( c ) Setiap warganegara dewasa mempunyai kemampuan untuk mengadakan penilaian terhadap proses politik, karena mereka mempunyai informasi politik yang memadai.

Kelemahan model ini adalah menganggap semua warganegara yang sudah dewasa memiliki kemampuan yang sama, padahal kenyataannya tidak semua warganegara dewasa mempunyai hak pilih yang sama, misalnya karena gila, orang yang tengah menjalani hukuman, dan sebagainya. Selain itu, tidak semua warganegara dewasa mempunyai ketertarikan politik yang sama, sehingga informasi politikpun beragam.

#### **A .4. Kekuasaan dalam budaya Jawa**

Berbicara masalah kekuasaan, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari fenomena yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, di mana ada perbedaan dalam memandang konsep kekuasaan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana konsep

kekuasaan menurut masyarakat Jawa, akan lebih mudah apabila kita membedakan dengan konsep kekuasaan menurut Barat. Menurut Konsep barat, ada beberapa aspek penting dalam memandang kekuasaan, yaitu :

1. Kekuasaan itu abstrak, kekuasaan itu tidak ada. Kekuasaan adalah kata yang biasanya digunakan untuk menerangkan satu bentuk hubungan manusia. Hubungan tersebut berupa hubungan mempengaruhi dan mentaati. Seseorang dikatakan mempunyai kekuasaan apabila dia dapat menunjukkan hubungan kausal antara perintah dan pelaksanaannya,
2. Sumber-sumber kekuasaan bersifat heterogen. Seseorang dapat mempengaruhi orang lain apabila dia mempunyai dan mampu menggunakan sumber-sumber kekuasaan yang beraneka macam, misalnya kekayaan, jabatan, status sosial, senjata dan sebagainya.
3. Jumlah kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan tidak akan bersifat terbatas karena kekuasaan merupakan abstraksi yang menggambarkan hubungan antar manusia. Lagi pula sumber-sumber kekuasaan selalu bertambah, baik jenis, jumlah maupun kualitasnya sejalan dengan tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dari segi moral, kekuasaan itu berarti ganda. Akibat logis dari konsep sekuler mengenai kekuasaan politik sebagai hubungan antar manusia, bahwa kekuasaan seperti itu tidaklah dengan sendirinya absah. Arti moral ganda ini dikarenakan tingkat legitimasi yang bersifat heterogen artinya apakah paksaan fisik selalu merupakan sumber yang sah dalam kekuasaan ?

Kekuasaan Jawa tidak mengenal konsep kekuasaan seperti orang barat, terutama yang bersumber dari Kraton. Kebudayaan Jawa ini tidak hanya tersebar luas dalam masyarakat pada masanya, namun sampai saat ini masih dihayati oleh masyarakat. Kebudayaan Jawa memiliki konsep yang hampir mirip dengan kekuasaan, yakni yang disebut "*Kesakten*".

Konsep kekuasaan Jawa mempunyai beberapa aspek , yaitu :

1. Kekuasaan itu kongkret. Kekuasaan itu ada, terlepas dari orang yang mungkin mempergunakannya. Kekuasaan merupakan kekuatan spiritual, misterius dan tak nyata yang menggerakkan dunia. Kekuasaan terwujud dalam setiap aspek

dunia, misalnya pada batu, kayu, awan , api, pohon, dan sebagainya. Kekuasaan ini juga dinyatakan dalam misteri kehidupan, misalnya generasi dan regenerasi, muncul pula pada animisme.

2. Kekuasaan itu homogen. Semua kekuasaan sama jenisnya dan sama sumbernya. Kekuasaan di tangan satu individu atau satu kelompok identik dengan kekuasaan yang ada di tangan individu atau kelompok lain manapun.
3. Jumlah kekuasaan di dunia selalu tetap. Menurut pandangan Jawa, alam semesta tidak bertambah luas dan tidak pula bertambah sempit, demikian pula jumlah kekuasaan yang terdapat di dalamnya selalu tetap. Karena kekuasaan itu ada bukan karena kekayaan, organisasi maupun paksaan fisik, maka kuantitasnya tetap. Namun distribusinya dapat berubah, pemegangnya dapat berganti-ganti. Konsentrasi kekuasaan pada satu tempat atau tangan berarti pengurangan secara proporsional pada tempat dan tangan lain.
4. Kekuasaan tidak mempersoalkan keabsahan. Karena sumber kekuasaan berasal dari sumber tunggal yang homogen, maka kekuasaan itu sendiri lebih dahulu ada daripada masalah baik dan buruk. Menurut pemikiran Jawa, menuntut hak berkuasa berdasarkan sumber-sumber kekuasaan yang berbeda, tidak akan ada artinya, misalnya mengatakan bahwa kekuasaan yang berdasarkan kekayaan adalah absah, sedangkan kekuasaan yang berdasarkan senjata tidak absah. Kekuasaan tidak absah dan tidak pula tidak absah. Kekuasaan ada. Kekuasaan tidak perlu pengakuan dari masyarakat.

Menurut budaya Jawa, kekuasaan diperoleh dengan cara bertapa, praktek yoga, berpuasa, meditasi, juga melakukan upacara-upacara kebesaran yang melibatkan banyak orang, obyek-obyek yang mengandung “kekuatan” dan symbol-simbol yang mengandung mistis, termasuk di dalamnya upacara kenegaraan dan pementasan wayang dengan lakon terpilih. Cara lain yang sering dipakai untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengumpulkan benda-benda, misalnya keris, gamelan, payung kebesaran dan barang-barang pusaka lainnya. Tanda-tanda yang jelas untuk mengidentifikasikan siapa yang berkuasa adalah orang yang memusatkan kekuatan diri dengan melakukan bertapa, menyerap kekuasaan dari luar dengan cara mengklaim bahwa dirinya merupakan inkarnasi dari dewa dan memusatkan dirinya sendiri hal-hal



yang bertentangan. Tanda umum lainnya yang bisa digunakan untuk mengetahui siapa yang berkuasa, yakni wahyu. Perpindahan wahyu atau “pulung” biasanya menandai memudarnya atau jatuhnya dinasti atau rezim. Kehadiran kekuasaan sehari-hari dapat dilihat pada wajah orang yang berkuasa, yakni ada tidaknya ”teja “ atau cahaya pada wajah orang yang berkuasa.

## **B. KEWENANGAN DAN LEGITIMASI**

Di dalam membicarakan kekuasaan, pasti akan dikaitkan dengan kewenangan. Menurut Robert Biersdeth ( dalam Budiardjo, 1984 : 15 ) **kewenangan** diartikan sebagai **kekuasaan yang dilembagakan**. Sementara Harold Laswell dan Abraham Kaplan mengatakan wewenang adalah **kekuasaan formal**. Dianggap bahwa orang yang mempunyai wewenang berhak mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Menurut Martini ( 2007 ) menyatakan bahwa kewenangan adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam satu tata tertib social untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah yang penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seorang yang mempunyai kewenangan berarti bertindak sebagai orang yang membimbing atau memimpin orang banyak.

**Kewenangan** merupakan **kekuasaan yang memiliki keabsahan** ( legitimate power ), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Pada kekuasaan, seseorang dapat saja memaksakan kehendaknya pada pihak lain tanpa mempunyai wewenang, di mana pihak yang dikuasai terpaksa mentaatinya meskipun tidak ada kewajiban baginya untuk mentaatinya, misalnya dalam kasus perampokan atau penodongan.

Menurut Surbakti ( 1992 : 86 ), ada beberapa sumber kewenangan untuk memerintah, yaitu :

1. Hak memerintah berasal dari tradisi, artinya kepercayaan yang telah berakar terpelihara secara terus menerus dalam masyarakat, yang berujud keyakinan bahwa yang ditakdirkan menjadi pemimpin adalah dari keluarga tertentu dan yang dianggap mempunyai “ darah biru “,

2. Hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa atau Wahyu. Atas dasar hak itu, wewenang atau hak memerintah dianggap sacral.
3. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan diri pribadinya yang populer maupun memiliki charisma.
4. Hak memerintah berasal dari perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintah.,
5. Hak memerintah berasal dari sumber-sumber yang bersifat instrumental, seperti kekayaan dan ketrampilan atau keahlian.

Kelima sumber kewenangan di atas, dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni **kewenangan yang bersifat procedural**, yaitu hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dan **kewenangan yang bersifat substansial**, yaitu hak memerintah berdasarkan factor-faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi, sacral, kualitas pribadi dan instrumental. Semakin kompleks struktur masyarakat suatu negara, maka tipe kewenangan yang digunakan cenderung bersifat procedural. Struktur masyarakat yang kompleks ditandai oleh diferensiasi struktur dan spesialisasi peranan, dan hubungan impersonal yang sudah meluas sehingga masyarakat memerlukan pengaturan yang bersifat tertulis dan rasional. Sebaliknya masyarakat tradisional atau strukturnya masih sederhana, yang ditandai dengan diferensiasi struktur dan spesialisasi peranan dan hubungan impersonal yang masih sedikit cenderung menggunakan tipe kewenangan substansial, karena kehidupan lebih banyak berdasarkan pada tradisi, kepercayaan pada kekuatan supranatural dan kesetiaan pada tokoh pemimpin. Namun dalam kenyataan, kedua tipe tersebut selalu ada secara bersama-sama, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, yang membedakan adalah lebih cenderung ke arah mana.

Max Weber ( dalam Budiardjo, 1984 : 14 ), membagi wewenang dalam tiga macam, yaitu :

1. **Wewenang Tradisionil**, di mana seseorang mempunyai wewenang karena tradisi. Kewenangan Tradisionil adalah kewenangan yang telah melembaga dan bahkan menjiwai masyarakat, bukan karena mereka mempunyai kemampuan yang khusus, seperti kewenangan kharismatik

2. **Wewenang Kharismatik**, merupakan kewenangan yang didasarkan pada kharisma, yaitu kemampuan khusus ( wahyu, pulung ) yang ada pada diri seseorang, di mana orang sekitarnya mengakui kemampuan tersebut atas dasar kepercayaan dan pemujaan. Dalam kenyataan kewenangan kharismatik ini dapat memudar apabila yang bersangkutan meninggal dunia, dan belum tentu ada pengganti yang mampu meneruskan kewenangan tersebut,
3. **Kewenangan legal rasional**, adalah kewenangan yang didasarkan pada sistem yang berlaku dalam masyarakat. Yang ditekankan bukan orangnya, tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.

Sama seperti dalam tipe sebagaimana disampaikan oleh Ramlan Surbakti, ketiga macam wewenang inipun tidak akan selalu ada dalam kenyataan di masyarakat, yang ada adalah penggabungan ketiganya.

Kewenangan yang dimiliki seseorang akan dikaitkan dengan jabatan yang diembannya, di mana jabatan akan bersifat relatif tetap, sedangkan orang yang memegang jabatan tersebut akan berganti. Hal ini disebabkan umur, kemampuan dan kearifan manusia yang terbatas. Di samping itu, semakin lama orang memegang jabatan, semakin dia menganggap jabatan tersebut milik pribadinya, sehingga akan cenderung menyeleweng. Oleh karena itu , peralihan kewenangan dari seseorang atau sekelompok orang kepada orang atau kelompok lain merupakan keharusan.

Menurut **Paul Conn** ( dalam Surbakti 1992, 89 ), ada tiga cara peralihan kewenangan, yakni :

1. Secara **turun temurun**, yakni jabatan dan kewenangan dialihkan kepada keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu. Hal ini terjadi dalam sistem otokrasi tradisionil, seperti kerajaan dan kesultanan,
2. Secara **pemilihan**, dapat dilakukan secara langsung melalui badan perwakilan rakyat atau secara langsung. Hal ini dipraktekkan dalam negara demokrasi,
3. Secara **paksaan**, yakni jabatan dan kewenangan terpaksa dialihkan kepada orang atau kelompok lain tidak menurut prosedur yang sudah disepakati, melainkan dengan menggunakan kekerasan, seperti revolusi dan kudeta, ancaman kekerasan. Pada umumnya ini terjadi dalam negara yang belum stabil. Kajian lain yang berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan adalah

### **Legitimasi.**

Sebagaimana halnya kekuasaan dan kewenangan, legitimasi berkaitan juga dengan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Konsep legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atau tidak. **Legitimasi** merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Yang dapat memberikan legitimasi adalah masyarakat. Pihak yang memerintah tidak dapat memberikan legitimasi atas kewenangannya. Pemimpin pemerintahan dapat mengklaim kewenangan, dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa kewenangannya sah, Namun demikian, hanya masyarakatlah yang menentukan apakah kewenangan itu berlegitimasi atau tidak.

Ada lima tipe legitimasi berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, yakni legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural dan legitimasi instrumental. Tipe-tipe tersebut berkaitan erat dengan tipe-tipe kewenangan.

Legitimasi tradisional, legitimasi kualitas pribadi berkaitan dengan kewenangan tradisional dan kharismatik. Legitimasi ideologi diberikan kepada pemimpin karena sang pemimpin dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Tipe legitimasi prosedural dukungan diberikan karena pemimpin mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tipe instrumental dukungan diberikan karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil kepada masyarakat.

-----

### **RINGKASAN**

Kekuasaan sebagai gejala sosial di masyarakat terbentuk karena ketidaksamaan dalam distribusi kekuasaan. Kekuasaan secara umum dapat dimaknai sebagai

kemampuan seseorang atau pelaku untuk mempengaruhi orang lain, sehingga perilaku orang tersebut sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan tersebut. Kekuasaan bisa bersumber dari kekayaan kepandaian, paksaan, kepercayaan dan sebagainya, yang mana semua kekuasaan tersebut berbentuk piramida.

Dalam membicarakan kekuasaan, ada kajian lain yakni kewenangan dan legitimasi. Kewenangan sebagai suatu hak moral bagi seorang pemimpin untuk membuat, melaksanakan dan memaksakan aturan, sedangkan legitimasi merupakan pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki pemimpin.

## **EVALUASI**

1. Jelaskan pengertian kekuasaan ?
2. Jelaskan piramida kekuasaan menurut Nac Iver ?
3. Jelaskan sumber-sumber kewenangan yang dimiliki pemimpin ?
4. Jelaskan makna legitimasi ?
5. Jelaskan tipe-tipe legitimasi ?

## **REFERENSI**

1. Rina Martini, dkk, Sosiologi pemerintahan, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
2. Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi ( Edisi II ), Jakarta, FE- UI, 2000
3. Budiardjo, Miriam, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Sinar harapan, Jakarta, 1984.
4. Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992
5. Syafiee, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Bandung, 2005.

## **B A B V**

### **SOSIALISASI DAN BUDAYA POLITIK DALAM PEMERINTAHAN**

#### **TUJUAN PEMBELAJARAN :**

Setelah nenpelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan memahami makna sosialisasi dan budaya politik dalam pemerintahan , yang nantinya dapat diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### **PENDAHULUAN**

Sering anda melihat anak-anak sekolah bersama-sama mengucapkan Pancasila di kelas secara bergantian atau menyebutkan bendera, lagu kebangsaan dan sebagainya. Demikian pula sering anda lihat bagaimana masyarakat mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang berkaitan dengan pemerintahan. Gejala lain yang sering anda lihat adalah bagaimana reaksi atau sikap seseorang terhadap peristiwa-peristiwa kenegaraan. Berbagai gejala yang terlihat tersebut, menunjukkan bahwa sosialisasi dan budaya politik merupakan fenomena yang selalu ada di masyarakat pemerintahan.

#### **A. SOSIALISASI POLITIK**

Sosialisasi politik merupakan kajian yang penting dalam sosiologi pemerintahan. Sosialisasi dimaknai sebagai cara dimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat mereka, serta bagaimana mereka mempelajari peranan-peranan yang diharapkan mereka jalankan bila sudah dewasa.

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan sosialisasi, antara lain :

1. David F. Aberle, Sosialisasi adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu berbagai ketrampilan ( termasuk ilmu pengetahuan ), motif dan sikap yang perlu untuk menampilkan peranan yang sekarang atau sedang diantisipasi dan terus berkelanjutan sepanjang kehidupan manusia, dimana norma dan peranan-peranan baru masih harus dipelajari.

2. .Irvin L. Child, Sosialisasi adalah segenap proses pada individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku aktualnya yang dibatasi dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan biasa diterima olehnya sesuai standard dari kelompoknya,
3. S.N. Einsendstandt, Sosialisasi sebagai komunikasi dengan manusia lainnya dan mempelajari dari mereka, dengan siapa individu ini secara bertahap memasuki beberapa jenis relasi umum.
4. Peter Berger, Sosialisasi sebagai proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang diajarkan dalam sosialisasi adalah peran - peran.

Menurut Sunarto ( 2000 : 24 ), dalam proses sosialisasi seorang belajar untuk mengetahui peran yang harus dijalankannya serta peran yang harus dijalankan orang lain, di mana melalui penguasaan peran yang ada dalam masyarakat ini seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Salah satu teori peran yang dikaitkan dengan sosialisasi adalah teori **George Herbert Mead**. Menurutnya pengembangan diri manusia berlangsung melalui **tahap play stage, tahap game stage dan tahap generalized other**. Pada tahap play stage, seorang anak mulai belajar mengambil peran orang yang ada di sekitarnya, misalnya menirukan peran yang dijalankan orang tuanya sebagai ayah atau ibu, tanpa mengetahui maksud dari peran itu. Selanjutnya pada tahap game stage, seorang anak tidak hanya telah mengetahui peran yang harus dijalankannya, tetapi telah mengetahui peran yang harus dijalankan oleh orang lain dan dengan siapa dia berinteraksi, misalnya dalam bermain basket, sepak bola, dia sudah tahu peran yang dimainkan dan peran temannya. Tahap generalized other, seseorang dianggap telah mampu mengambil peran-peran yang dijalankan orang lain dalam masyarakat.

#### **A. 1. SOSIALISASI POLITIK**

Sosialisasi politik merupakan bagian dari sosialisasi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Menurut Mas,oed dan Mac Andrews( 1988 ), Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Jadi sosialisasi

politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Di samping itu sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk ” mewariskan ” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Proses ini disebut Trasmisi kebudayaan.

**Rush dan Althoff** ( dalam Gatara dan Moh. Dzulkiah Said , 2007 : 78 ) mengatakan bahwa sosialisasi cukup signifikan dalam politik. Menurutnya sosialisasi penting dalam politik, karena berbagai alasan , yaitu :

1. Sosialisasi secara mendasar adalah proses hasil belajar dari suatu pengalaman,
2. Sosialisasi memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas yang luas, baik terkait dengan pengetahuan atau informasi, motif atau nilai maupun sikap,
3. Sosialisasi bukan hanya diberikan selama masa kanak-kanak dan masa remaja, melainkan juga diberikan kepada semua lapisan usia dan berlanjut sepanjang kehidupan.

Sikap dan orientasi masyarakat yang dihasilkan dari sosialisasi politik pada gilirannya memberikan pengaruh yang kuat terhadap tingkat partisipasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik seseorang atau kelompok masyarakat dalam segala aktivitas kehidupannya. Melalui proses sosialisasi politik inilah, menurut Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt ( dalam Gatara, 2007 : 78 ), anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam lingkungannya. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal dan informal maupun tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, proses sosialisasi dapat juga diperoleh seseorang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui transformasi media massa ( elektronik maupun cetak ).

Dengan demikian, proses sosialisasi politik sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial, ekonomi dan budaya tempat individu berada. Selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman serta kepribadiannya. Oleh karenanya, wajar bila sosialisasi politik banyak dianggap sebagai salah satu konsep kunci dalam sosiologi politik. Sosialisasi politik membentuk, mewariskan sekaligus



memelihara kebudayaan politik suatu bangsa, sosialisasi politik juga bisa mengubah kebudayaan politik, manakala sosialisasi itu menyebabkan penduduk atau sebagian besar penduduk melihat atau mengalami kehidupan politik yang dijalankan dengan cara lain, misalnya karena ada perang atau revolusi. Dengan demikian, sosialisai politik merupakan alat di mana individu menjadi sadar serta menyesuaikan diri ke dalam sistem dan kebudayaan politik.

## **A.2. BENTUK DAN METODHE SOSIALISASI POLITIK**

Dilihat dari segi bentuk dan metodhe penyampaian pesan politik, sosialisasi politik dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. **Pendidikan politik**, merupakan proses yang dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol politik negara dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik dan melalui kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan. Pendidikan politik cenderung hidup dan berkembang dalam masyarakat dan sistem politik demokrasi. Fungsi lembaga-lembaga politik yang bernaung dalam payung sistem politik demokrasi adalah pendidikan politik. Lembaga politik yang memiliki fungsi tersebut antara lain partai politik. Dengan demikian, dalam konteks sistem politik demokrasi, partai politik sesungguhnya memiliki fungsi sosialisasi politik, khususnya dalam metodhe pendidikan politik.
2. **Indoktrinasi politik**, adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap mereka sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin, partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik. Di sini, partai politik sebagai lembaga politik yang bernaung dan hidup dalam sistem politik totaliter memiliki fungsi sosialisasi dalam bentuk indoktrinasi politik.

### A. 3. MEDIA DAN PERKEMBANGAN SOSIALISASI POLITIK

Media atau sarana sosialisasi politik sangat berpengaruh pada perkembangan sosialisasi politik. Ada beberapa sarana yang bisa dipakai dalam sosialisasi politik, yaitu :

1. **Keluarga.** Pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun tidak langsung sangat kuat dan kekal. Keluarga merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Yang paling jelas pengaruh dari keluarga ini adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Keluarga biasanya membuat peraturan atau keputusan bersama dan bagi si anak keputusan itu bisa otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhi dapat menimbulkan sangsi. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi aktif dalam sistem politik setelah dewasa.
2. **Sekolah.** Orang yang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan ” saluran pewarisan ” nilai-nilai dan sikap masyarakatnya. Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap ” aturan main politik ” yang tidak tertulis.
3. **Kelompok pergaulan,** termasuk di dalamnya kelompok bermain di masa kanak-kanak, kelompok persahabatan dan kelompok kerja yang kecil, di mana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan memiliki ikatan yang erat dan kuat. Kelompok pergaulan mensosialisasikan anggota- anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut kelompok tersebut.

4. **Pekerjaan.** Pekerjaan dan organisasi formil maupun non formil yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan, seperti serikat buruh., Klub sosial, juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas.
5. **Media massa.** Masyarakat modern tidak bisa hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat dan secara umum seragam. Informasi tentang peristiwa yang terjadi di mana saja menjadi ” pengetahuan ” umum dalam beberapa waktu. Media massa, surat kabar, televisi, majalah memegang peranan yang penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa yang baru merdeka. Di samping itu, media massa juga menyampaikan, langsung atau tidak langsung nilai-nilai utama yang dianut masyarakatnya.
6. **Kontak-kontak politik langsung.** Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga, sekolah, tetapi apabila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu polisi, kelaparan tidak ditolong, pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilihan umum, krisis politik dan daya tanggap badan pemerintah terhadap tuntutan individu dan kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum.

Media sosialisasi di atas merupakan media yang mengantarkan proses sosialisasi politik sehingga akan tampak bagaimana terjadinya perkembangan sosiologi politik.

Perkembangan sosialisasi politik dapat kita lihat dari dua fase, yaitu :

1. Masa anak-anak. Easton dan Dennis ( dalam Gatara, 2007 : 81 ), mengemukakan empat tahap perkembangan dalam sosialisasi politik diri anak-anak, yaitu :
  - Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua, presiden, polisi, dan sebagainya,
  - Perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan eksternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah,
  - Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, misalnya pemilu,
  - Perkembangan perbedaan antara institusi-institusi politik dan mereka terlibat dalam aktivitas yang disosialisasikan dengan institusi-institusi ini, sehingga gambaran yang diidealisasi mengenai pribadi-pribadi

husus seperti presiden, menteri telah dialihkan pada kepresidenan dan kementrian.

2. Masa remaja. Masa ini merupakan masa di mana terjadi transisi dari anak-anak menjadi dewasa, sehingga berbagai peristiwa atau gejala, perasaan akan muncul. Biasanya mereka sudah mengenal teman sebaya, yang akan menjadi panutan. Informasi yang berkembang di kalangan remaja bisa berupa hal yang tidak krusial, termasuk informasi yang diperoleh dari media massa. Remaja berkenalan dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, peristiwa kehidupan dalam dan luar negeri. Meskipun demikian, informasi yang diterima sering dirasakan kontradiktif dengan apa yang dilihat dalam kenyataannya, sehingga mereka menjadi bingung, stres, acuh atak acuh. Hal ini terjadi karena interpretasi dan intelegensi serta lingkungan remaja tidak selalu sama, sehingga informasi yang diberikan media massa tidak saja membawa pengaruh positif, tetapi juga negatif.

#### **A. 4. SOSIALISASI PRIMER DAN SEKUNDER**

Sosialisasi yang merupakan proses berlangsung sepanjang hidup, dapat dikelompokkan menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Berger dan Lukman ( dalam Sunarto, 2003 : 31 ), mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia obyektif masyarakatnya.

#### **A. 5. PENGARUH KELOMPOK DALAM SOSIALISASI POLITIK**

Kelompok merupakan salah satu unsur pokok yang mempengaruhi perubahan perilaku politik seseorang sebagai hasil dari sosialisasi politik. Ada tiga jenis kelompok yang dianggap penting kaitannya dengan pengaruh terhadap perubahan perilaku politik, yaitu :

1. Kelompok primer, yaitu kelompok yang melibatkan perkumpulan dimana anggotanya bertemu langsung dalam waktu yang lama,
2. Kelompok acuan, yaitu kelompok yang dikenali dan digunakan sebagai acuan atau referensi, tetapi tidak harus selalu bersifat resmi,

3. Kelompok kasual, yaitu sekelompok orang yang terbentuk satu kali saja dan anggotanya tidak saling kenal sebelum mereka berkumpul.

#### **A. 6. PENGARUH INDIVIDU DALAM SOSIALISASI**

Dalam sosialisasi politik, pengaruh individu dapat dirasakan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Para pemilih membuat keputusan di akhir sosialisasi atau mengubah pendapat mereka selama sosialisasi mempunyai kemungkinan lebih besar dipengaruhi oleh pribadi,
2. Pemimpin opini dijumpai pada setiap tingkat sosial dan diasumsikan sangat mirip dengan orang-orang yang mereka pengaruhi,
3. Pemimpin opini ditemukan lebih terekspose ke media massa daripada orang-orang yang tidak dinyatakan sebagai pemimpin opini.

#### **B. BUDAYA POLITIK**

##### **B. 1. Pengertian Budaya Politik**

Berbicara sosialisasi politik, kita pasti akan mengkaitkan dengan budaya politik suatu masyarakat. Budaya Politik menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba ( 1990 : 14 ) adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sebuah sistem politik.

Di samping Gabriel Almond, ada beberapa pakar yang mendefinisikan budaya politik, antara lain :

1. Austin Ranney, menyebutkan budaya politik adalah seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi terhadap obyek-obyek politik,
2. Alan R, Ball, mendefinisikan budaya politik sebagai suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan issue-issue politik.
3. Rusadi Kantaprawira, menyebutkan budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
4. Nazaruddin Syamsudin ( 1993 : 90 ) berpandangan bahwa budaya politik lazimnya diartikan sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, bahasa dan lambang

yang dimilikinya. Bagaimana sikap, kepercayaan dan perasaan seseorang terhadap sistem politik sebenarnya ditentukan oleh bagaimana hubungan antara kebudayaan masyarakat itu dengan struktur politiknya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pada hakekatnya budaya politik mempunyai beberapa substansi, yaitu :

1. Konsep budaya politik lebih mengedepankan berbagai perilaku non aktual ketimbang perilaku aktual. Perilaku non aktual misalnya adalah orientasi, sikap, nilai dan kepercayaan-kepercayaan,
2. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik, ini berarti pembicaraan tentang budaya politik tidak bisa lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen yang terdiri dari komponen struktur dan fungsi dari sistem politik. Misalnya orientasi politik terhadap lembaga kepresidenan ( eksekutif ), legislatif, dan sebagainya,
3. Budaya politik merupakan diskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif ( dalam jumlah besar ), atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal tersebut berkenaan dengan pemahaman bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal, yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

## **B. 2. Tipologi dan Obyek Budaya Politik**

Budaya politik yang ada di masyarakat merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa tersebut. Budaya politik mempunyai beberapa komponen orientasi, yaitu :

1. Orientasi kognitif, yakni menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, berisikan kesadaran , pengetahuan dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, serta input dan outputnya. Misalnya lambang negara, Kepala Negara, batas negara dan sebagainya,
2. Orientasi afektif, berisikan emosi-emosi dan perasaan terhadap sistem politik, obyek, peranannya, para aktor dan penampilannya,

3. Orientasi evaluatif, menyangkut keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi ini menyangkut kapasitas individu dalam memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berlaku dan bagaimana peranan individu di dalamnya.

Obyek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap :

1. Sistem, yakni sebagai suatu keseluruhan dan termasuk berbagai perasaan tertentu, seperti patriotisme dan alienasi, kognisi dan evaluasi suatu bangsa,
2. Pada pribadi sebagai aktor politik : isi, kualitas, norma-norma, kewajiban politik seseorang serta isi dan kualitas kemampuan diri setiap orang *vis a vis* sistem politik

Rusadi Kantaprawira menjelaskan bahwa obyek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap :

1. Sistem politik secara keseluruhan yang meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran ruang lingkup lokasi, persoalan kekuatan, karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya,
2. Proses input, yang meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau yang diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk menterjemahkan atau mengkonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijakan yang otoritatif sifatnya. Dengan demikian, menurutnya, proses input antara lain meliputi pula pengamatan atas partai politik, kelompok kepentingan dan alat komunikasi massa yang nyata-nyata berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai alat (sarana) penampung berbagai tuntutan,
3. Proses output yang berkenaan dengan fungsi pembuatan aturan/ perundang-undangan oleh legislatif, fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif dan fungsi peradilan,
4. Diri sendiri, yakni yang dipersoalkan adalah apakah yang menjadi hak, kewajiban dan kekuasaan. Apakah yang bersangkutan dapat memasuki lingkungan orang

atau kelompok yang mempunyai pengaruh atau bahkan bagaimana caranya untuk mengingatkan pengaruhnya sendiri.

Berdasarkan sikap dan orientasi politik masyarakat, budaya politik dapat digolongkan menjadi beberapa type, yaitu :

1. Budaya politik *parokial*. Masyarakat pada budaya ini mengalami proses apriori terhadap persoalan-persoalan politik, bahkan bisa dikatakan ”apolitik”. Sikap dan orientasi politik dalam masyarakat ini didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif,
2. Budaya politik Subyek atau kaula, di sini terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek input secara khusus dan terhadap pribadi sebagai partisipasi yang aktif, mendekati nol. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah. Mereka secara efektif diarahkan terhadap sistem itu, atau mungkin tidak menyukainya, dan mereka menilainya sebagai absah atau sebaliknya. Akan tetapi, hubungannya terhadap semua bersifat pasif, walaupun ada bentuk kompensasi terbatas yang tersedia di dalam kebudayaan subyek. Dengan demikian budaya politik subyek ini orientasi yang lebih dominan adalah karakteristik afektive,
3. Budaya politik partisipan, yakni suatu bentuk kultur yang anggota-anggota masyarakatnya cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik secara administratif. Dengan demikian, budaya politik partisipan akan didominasi oleh karakteristik yang bersifat evaluatif.

Gabriel Almond dan Sidney Verba, mengklasifikasikan budaya politik menjadi beberapa type, yaitu :

1. Budaya politik subyek parokial, yakni suatu tipe budaya politik di mana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-stuktur pemerintahan pusat yang lebih bersifat khusus,



2. Budaya politik partisipan subyek, yakni cara bagaimana proses peralihan dari budaya parokhial menuju budaya subyek dilakukan pasti akan mempengaruhi cara bagaimana proses peralihan dari budaya subyek menuju budaya partisipasi langsung,
3. Budaya politik parokhial partisipan. Dalam tipe ini, selalu mendapat masalah kontemporer mengenai pembangunan kebudayaan di negara sedang berkembang.. Budaya politik yang dominan adalah budaya parokial, norma-norma struktural yang telah diperkenalkan biasanya bersifat partisipan; demi keselarasan, mereka menuntut suatu kultur partisipan.

### **B. 3. Budaya Politik di Indonesia**

Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik secara tidak langsung merupakan realitas yang paling dianggap intens dan mendasari sistem politik Indonesia.. Sistem politik yang dipengaruhi dan dilandasi kebudayaan politik baru dapat dimengerti dan dipahami dengan baik setelah melampaui waktu yang panjang, karena budaya politik dan struktur politik tidak pernah bersifat stagnan, tetapi selalu bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Menurutnya, konstataasi sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus dikaji dan dibuktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang berbagai variabel, yaitu :

1. Konfigurasi subkultur di Indonesia yang masih beragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India, misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang masih bersifat rawan. Pada prinsipnya persoalan keanekaragaman subkultur di Indonesia masih bisa diselesaikan dengan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.
2. Budaya politik Indonesia yang bersifat parokhial subyek di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Di satu segi massa masih ketinggalan di dalam menggunakan hak-hak serta memikul tanggungjawab politiknya, yang mungkin disebabkan karena pengaruh penjajahan, feodalisme dan ikatan promordial, di lain pihak para elit merupakan partisipan yang aktif yang disebabkan pengaruh pendidikan barat, bahkan kadang bersifat sekuler, dalam arti relatif dapat membedakan penyebab desintegrasi, misalnya agama, primordialisme. Di lihat dari segi ini, sebenarnya merupakan kondisi yang mencerahkan, karena ternyata

ide itu masih berperan besar sebagai salah satu modal pembangunan. Jadi terlihat bahwa budaya politik Indonesia merupakan ” mixed political structure ” yang diwarnai oleh besarnya pengaruh dari kebudayaan parokhial subyek.

3. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, dengan indikator berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, agama, dan sebagainya.
4. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat-sifat patrimonial, dengan indikator antara lain sikap asal bapak senang.
5. Dilema dari interaksi tentang introduksi modernisasi dengan segala konsekuensinya dengan pola-pola yang telah lama berurat berakar dalam masyarakat. Permasalahannya adalah apakah pelebagaan dalam sistem politik Indonesia sudah siap menampung proses pertukaran kedua variabel tersebut ?

-----

## **RINGKASAN**

Sosialisasi dan budaya politik merupakan satu fenomena yang selalu menyertai kehidupan masyarakat. Sosialisasi politik sebagai bagian dari sosialisasi sosial merupakan proses pengenalan sistem politik pada seseorang, kelompok atau masyarakat, serta respon yang mereka berikan terhadap gejala-gejala politik yang ada dan mereka hadapi. Ada berbagai media untuk sosialisasi politik, yaitu keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan, partai politik, lembaga kelompok kepentingan dan kelompok penekan dan media massa. Sosialisasi politik bisa dipengaruhi oleh kelompok maupun individu.

Budaya politik merupakan sikap dan orientasi individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya dan sikapnya terhadap peranan yang dimainkannya dalam sistem politik. Budaya politik berkaitan dengan orientasi yang bersifat cognitive, affective dan evaluatif. Budaya politik secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi budaya politik parokhial, budaya politik subyek dan budaya politik partisipan. Namun

dalam realitanya , budaya politik bisa merupakan kombinasi diantara ketiga tipe tersebut.

## **EVALUASI**

1. Jelaskan pengertian sosialisasi politik ?
2. Jelaskan media yang digunakan untuk sosialisasi politik ?
3. Jelaskan pengaruh kelompok terhadap sosialisasi politik ?
4. Jelaskan tipe budaya politik yang ada ?
5. Jelaskan bagaimana budaya politik di Indonesia ?

## **REFERENSI**

1. Rina Martini, dkk, Sosiologi pemerintahan, Penerbit Universitas Terbuka Jakarta, 2007
2. Mac Andrews, Colin dan Moctar Mas, oed, Perbandingan Sistem Politik, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1984
3. Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia, suatu Model Pengantar, sinar Baru, Bandung, 1980
4. Said, Dzulkiah dan Said Gatara, Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, Pustaka setia, Bandung, 2007
5. Suryadi, Budi, Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep, IRCiSoD, Yogyakarta, 2007
6. Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992
7. Syamsudin, Nazzaruddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1993.

## **B A B VI**

### **KONFLIK DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

#### **TUJUAN PEMBELAJARAN :**

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti, memahami dan mampu menjelaskan kembali pandangan sosiologi Pemerintahan terhadap konflik yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang akhirnya dapat mensikapinya dalam menjalankan profesinya.

#### **PENDAHULUAN**

Apabila anda mengamati kehidupan dalam masyarakat, maka akan dijumpai adanya perbedaan pandangan terhadap suatu hal. Proses interaksi yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan konflik. Dalam skala tertentu konflik memang perlu diciptakan untuk memotivasi orang dalam meraih tujuan, namun satu hal yang penting bahwa terjadinya konflik tersebut perlu dimanajementi dengan baik, sehingga berdampak positif. Konflik juga terjadi dalam ranah kekuasaan, di mana perbedaan-perbedaan persepsi menimbulkan berbagai perilaku yang berbeda. Disinilah perlunya kita mempelajari mengapa terjadi konflik dalam masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

#### **A. PENGERTIAN KONFLIK**

Konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam setiap masyarakat sebagai akibat dari interaksi atau hubungan sosial. Dalam istilah lain dikenal ” tiada hari tanpa konflik ”, artinya seperti tiada individu atau masyarakat tanpa konflik, sehingga konflik sudah merupakan bagian hidup dalam masyarakat. Walaupun kita ketahui bahwa bentuk interaksi sosial tidak hanya berupa konflik, namun bisa juga berupa kerjasama, akomodasi dan persaingan.

Konflik mengandung pengertian adanya ” benturan ”, misalnya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah.

Pertentangan ini dapat berupa non fisik, namun dapat berkembang menjadi benturan fisik, dapat berbentuk kekerasan dan dapat pula tidak berbentuk kekerasan.

Menurut Kamus analisa politik, konflik sebagai suatu interaksi yang ditandai dengan bentrokan atau tubrukan di antara kepentingan, gagasan, kebijaksanaan, program dan pribadi atau persoalan dasar lainnya yang satu sama lain saling bertentangan.

Berbicara konflik, kita kembali kepada perspektif yang berbeda dalam memandang masyarakat, yaitu perspektif **konflik** ( pendekatan struktural konflik ) dan perspektif **konsensus** ( pendekatan struktural fungsional ). Perspektif konflik menyatakan bahwa masyarakat selalu berada pada ruang konflik yang terjadi secara terus menerus, baik pada tingkat dan skala kecil maupun skala besar dalam masyarakat. Pendekatan konflik ini didasarkan pada asumsi utama, yaitu :

1. Masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari kekuatan-kekuatan dominan. Kekuatan dominan ini dapat berupa pemodal atau negara,
2. Masyarakat mencakup berbagai bagian yang memiliki kepentingan berbeda dan saling bertentangan. Karenanya, masyarakat selalu dalam keadaan konflik.

Berdasarkan perspektif tersebut, pengertian konflik menurut beberapa ahli, yaitu :

1. Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama ( Achmad Fedyani Syaifudin : 1986 : 7 )
2. Konflik adalah gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan ( Lewis S. Cosen, dalam Syaifudin, 1986 )
3. Said, Dzulkiah ( 2007 : 183 ) Konflik politik adalah gejala pertentangan dalam masyarakat yang berkenaan dengan mata rantai kekuasaan dan negara.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu proses sosial di mana dua orang atau lebih berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Suatu konflik ditandai dengan pertentangan antara dua pihak yang mempunyai perbedaan-perbedaan dalam ciri badan, emosi, unsur-unsur kebudayaan dan pola-pola perilaku. Pertentangan juga ditandai dengan keinginan untuk menghancurkan atau menyakiti pihak lain.

Menurut Sutrisno, dalam Martini ( 2008 ), ciri-ciri terjadinya konflik adalah :

1. Adanya interaksi yang bersifat langsung dan dapat diamati di antara pihak-pihak yang berkonflik,
2. Mereka yang terlibat konflik memiliki perasaan saling memusuhi atau berlawanan,
3. Mereka yang terlibat konflik berjumlah paling sedikit dua orang.

Menurut Syarbaini ( 2002 : 30 ), konflik dapat berupa : Konflik pribadi, konflik rasial dan kebudayaan, konflik antar kelas sosial dan konflik politik dan pengaruh.

Dahrendorf, dalam Idianto ( 2004 : 95 ), menyatakan bahwa konflik dibedakan menjadi lima, yaitu :

1. Konflik antara atau dalam peranan sosial
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial,
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan yang tidak terorganisasikan,
4. Konflik antara satuan nasional,
5. Konflik antara negara atau antara negara dengan organisasi internasional.

Kuper & Kuper dalam Suryadi ( 2007 : 78 ), menyatakan ada tiga bentuk atau jenis konflik sosial, yaitu :

1. Dilihat dari pihak yang berkonflik dapat dibedakan atas dasar tingkat organisasi dan kekompakannya,
2. Konflik pada dasarnya terjadi karena adanya pertentangan tujuan, dan tujuan itu sendiri juga bervariasi, mulai dari penguasaan tanah, perebutan uang atau sekedar pertikaian atas hal-hal sederhana yang dianggap bernilai tinggi bagi pihak yang bertikai,
3. Konflik dapat juga dibedakan atas dasar cara yang digunakan, cara itu sendiri juga bermacam-macam, antara lain ancaman, pemaksaan atau bujukan.

## **B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KONFLIK**

Konflik yang terjadi dalam masyarakat, menurut Soekanto ( 1987 : 86 ), dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu :

1. Perbedaan antara orang perorangan. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin menyebabkan bentrokan antara orang perorangan.

2. Perbedaan kebudayaan. Kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan individu dapat menyebabkan terjadinya konflik. Sadar atau tidak sadar, pola-pola pembentukan kepribadian akan membentuk perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok dalam masyarakat,
3. Bentrokan antara kepentingan-kepentingan. Kepentingan yang berbeda diantara individu atau kelompok dapat menyebabkan timbulnya konflik, misalnya kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, politik dan sebagainya.
4. Perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat, untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada, dan menyebabkan terjadinya perbedaan pendirian diantara golongan-golongan yang ada di masyarakat.

Ada berbagai teori penyebab terjadinya konflik menurut Simon Fisher ( 2000 ) yang diterjemahkan S.N. Kartikasari, dkk ), yaitu :

1. Teori hubungan masyarakat. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya polarisasi yang terus terjadi dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah :
  - a. meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antar kelompok yang mengalami konflik,
  - b. mengusahakan toleransi agar masyarakat bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.
2. Teori negosiasi prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan adanya posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah :
  - a. membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan issue dan mendorong pihak-pihak atau kelompok yang berkonflik untuk melakukan negosiasi yang dilandasi kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap
  - b. melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak atau semua pihak.

3. Teori kebutuhan manusia. Teori ini berasumsi bahwa konflik yang terjadi bisa disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau sengaja dihambat oleh pihak lain. Kebutuhan dasar manusia biasanya menyangkut tiga hal, yakni kebutuhan fisik, mental dan sosial. Sasaran yang hendak dicapai dari teori ini adalah :
  - a. Membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi dan mengupayakan secara bersama-sama mengenai kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi sehingga memperoleh pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
  - b. Membantu agar pihak-pihak yang berkonflik dapat meraih kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.
4. Teori Identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi akibat adanya identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang hendak dicapai dari teori ini adalah :
  - a. melalui fasilitas komunikasi dan dialog antar pihak yang berkonflik, mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka,
  - b. meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.
5. Teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan adanya ketidakcocokan dalam cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang hendak dicapai dalam teori ini adalah :
  - a. Menambah pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkonflik,
  - b. Mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain,
  - c. Meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.
6. Teori transformasi konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah



sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai dari teori ini adalah :

- a. Mengubah beberapa struktur yang dapat menimbulkan terjadinya ketidaksetaraan, ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi,
- b. Meningkatkan ikatan hubungan dan sikap jangka panjang di antara pihak yang berkonflik,
- c. Mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, rekonsiliasi dan legitimasi.

### **C. KONFLIK POLITIK**

Dalam setiap proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, akan selalu terjadi konflik di antara pihak-pihak yang berupaya mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber yang dipandang penting dan pihak lain yang juga berniat sama. Konflik selalu hadir dalam setiap masyarakat, sehingga ia tidak mungkin dihilangkan, melainkan hanya dapat diatur bagaimana penyelesaiannya.

Tidak semua konflik merupakan atau beraspek politik atau berimplikasi politik, sehingga mekanisme pengaturannya tidak selalu melibatkan pemerintah atau melalui mekanisme politik. Ada berbagai konflik yang tidak berdimensi politik, misalnya konflik pribadi, konflik ekonomi dan konflik sosial. Namun konflik-konflik tersebut dapat berubah menjadi konflik politik manakala penyelesaiannya melalui proses politik.

Sebuah konflik menurut Suhirman ( 2002 : 36 ) disebut sebagai konflik politik jika berkaitan dengan issue-issue dan kebijakan umum, yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan proses politik dan pemerintahan. Surbakti ( 1992 : 151 ) menyatakan konflik politik adalah sebagai perbedaan, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Jadi sepanjang konflik melibatkan pemerintah dan negara, maka disebut konflik politik. Konflik politik secara longgar diartikan sebagai perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan / atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan

yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Secara sempit, konflik politik diartikan sebagai kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa serta segenap aturan, struktur dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik. Istilah konflik dalam ilmu politik sering dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi. Konflik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berujud **kekerasan** dan konflik yang **tidak berujud kekerasan**. Konflik yang mengandung kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar negara, tujuan negara dan mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Contoh bentuk konflik ini adalah huru hara, kudeta, pemberontakan dan sebagainya. Konflik yang tidak berujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan negara dan mekanisme penyelesaian konflik yang melembaga. Mekanisme disini adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, dewan perwakilan rakyat, pengadilan pemerintah, pers dan forum lainnya. Contoh konflik yang tidak berujud kekerasan adalah unjuk rasa, pemogokan, pengajuan petisi, protes dan dialog dan polemik melalui media.

Konflik yang ada dalam masyarakat pada hakekatnya akan reda apabila ada toleransi dan interaksi sosial guna memelihara hubungan. Interaksi sosial yang intensif dalam kurun waktu yang lama akan mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga konflik akan berkurang intensitasnya. Hilangnya perbedaan dalam masyarakat tersebut akan meniadakan benih pertentangan yang ada, sebaliknya jika benih pertentangan dibiarkan terus, akan menghancurkan keutuhan kelompok sosial. Menurut Surbakti ( 2002 : 153 ), konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu :

1. **Konflik Positif**, adalah konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud adalah lembaga-lembaga demokrasi, seperti partai politik, dewan perwakilan rakyat, pengadilan pemerintah, pers dan forum-forum lainnya. Tuntutan akan perubahan yang

diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga tersebut merupakan salah satu contoh konflik positif,

2. **Konflik Negatif**, adalah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non konstitusional, misalnya kudeta, terorisme dan revolusi.

Pengelompokan tersebut mempunyai kelemahan, yakni apabila mayoritas masyarakat memandang lembaga dan struktur yang ada tidak mencerminkan kepentingan umum, maka konflik yang disalurkan melalui mekanisme politik justru dipandang sebagai konflik yang negatif. Sebaliknya, tindakan yang menentang sistem yang tidak mencerminkan kepentingan umum dipandang sebagai konflik yang positif. Untuk itu, dalam menentukan apakah sebuah konflik bersifat negatif atau positif sangat tergantung pada persepsi kelompok yang terlibat dalam konflik, terutama pada sikap masyarakat umum terhadap sistem politik yang berlaku. Dalam hal ini, yang menjadi patokan untuk menentukan suatu konflik bersifat positif atau negatif adalah tingkat legitimasi sistem politik, yang dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku.

Paul Conn ( dalam Surbakti : 2002 : 154 ) menyebutkan ada dua jenis situasi konflik, yakni konflik **menang-kalah** ( *zero-sum conflict* ) dan konflik **menang-menang** ( *non zero-sum conflict* ). Konflik **menang-kalah** adalah situasi konflik yang bersifat antagonis, sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ciri-ciri konflik ini adalah tidak mungkin melakukan kerjasama, hasil kompetisi akan dinikmati pemenangnya saja, sedang yang kalah akan kehilangan semuanya, dan yang dipertaruhkan biasanya menyangkut hal-hal yang dianggap prinsipil, misalnya harga diri, iman, kepercayaan, masalah hidup dan mati dan jabatan penting dalam pemerintah. Konflik **menang-menang** adalah situasi konflik dimana pihak-pihak yang berkonflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan kerjasama, sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam konflik seperti ini biasanya bukan hal yang prinsip, tetapi bukan berarti hal yang tidak penting, namun justru hal itu dianggap penting, sehingga perlu dialog, kompromi, kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.

#### D. PENYEBAB KONFLIK POLITIK

Konflik politik yang terjadi dalam masyarakat, pada hakekatnya disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu **kemajemukan horisontal dan kemajemukan vertikal**. **Kemajemukan horisontal** adalah struktur masyarakat secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama dan ras, dan majemuk secara sosial, dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, misalnya pedagang, nelayan, pegawai negeri, militer, wartawan dan sebagainya; dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal, misalnya desa, kota, pegunungan dan sebagainya. Kemajemukan horisontal kultural dapat menimbulkan konflik, karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang demikian, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang disepakati bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara atau separatisme. Kemajemukan horisontal sosial dapat menyebabkan konflik, karena masing-masing kelompok berdasarkan profesi dan tempat tinggal mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

**Kemajemukan vertikal** adalah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal ini dapat menyebabkan konflik politik, karena sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang berbeda dengan kelompok kecil masyarakat yang mempunyai sumber kekuasaan tersebut. Jadi distribusi kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan yang pincang akan menimbulkan konflik politik.

Adanya dua perbedaan tersebut tidak selalu dapat menimbulkan konflik, sepanjang masyarakat bisa menerima perbedaan tersebut, namun perbedaan tersebut tetap merupakan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat muncul manakala ada perbedaan kepentingan dalam memperebutkan sumber yang sama, atau karena pihak yang satu berperilaku "menyentuh titik kemarahan" pihak lain.

Intensitas terjadinya konflik menunjukkan pada dimensi besarnya ongkos atau energi yang dikeluarkan dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam konflik. Konflik yang mengandung kekerasan lebih merujuk pada akibat konflik daripada sebab-

sebabnya, yaitu berkaitan dengan senjata yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk menyatakan permusuhannya.

#### **E. FUNGSI KONFLIK**

Dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, konflik selalu tidak terhindarkan, karena memang kemajemukan dalam berbagai kepentingan yang rawan menimbulkan konflik. Satu hal yang perlu dipahami, konflik tidak dapat dihilangkan, yang dapat dilakukan hanya bagaimana konflik tersebut ditekan seminimal mungkin. Toleransi menjadi kaca kunci untuk meredakan konflik. Konflik yang terjadi dapat menghasilkan beberapa kondisi, yaitu :

1. Solidaritas bertambah,
2. Persatuan menjadi hancur atau retak,
3. Perubahan kepribadian atau sikap,
4. Korban jiwa dan harta ( terjadi perang ),
5. Akomodasi dan dominasi.

Sebuah konflik dapat membawa akibat positif atau negatif tergantung dari persoalan yang dipertentangkan dan struktur sosial dimana masyarakat berada. Apabila pertentangan tersebut tidak berlawanan dengan pola-pola hubungan sosial dalam struktur sosial tertentu, maka konflik itu bersifat positif, karena hal itu mempunyai kecenderungan untuk memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan sosial dalam kelompok tersebut sesuai kebutuhan individu atau bagian dari kelompok tersebut. Salah satu faktor yang dapat membatasi akibat negatif dari konflik adalah sikap toleransi yang sudah melembaga.

Dalam kelompok-kelompok di mana interaksi sosial antar warganya tidak terlalu kental, pertentangan tidak terlalu berpotensi negatif. Berbagai macam konflik mungkin terjadi, namun dianggap sebagai jalan untuk memecahkan dan mengurangi ketegangan, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan stabilitas dan integrasi.

Konflik tidak selalu bersifat negatif, karena konflik juga sebagai pengintegarsi masyarakat dan sebagai sumber perubahan. Penyampaian pendapat, ide dan tuntutan kebijakan yang berlainan atau yang bertentangan merupakan mekanisme untuk menghasilkan pemikiran baru atau kebijakan yang lebih baik. Kreativitas, inovasi dan

perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakat muncul dari konflik yang terjadi di antara komponen yang ada dalam masyarakat tersebut.

Selain itu, sebagai sumber perubahan, konflik juga berfungsi untuk menghilangkan unsur-unsur pengganggu dalam suatu hubungan. Dalam hal ini, konflik sebagai penyelesaian ketegangan antara unsur-unsur yang bertentangan, mempunyai fungsi ” penstabilisasi dan menjadi komponen mempererat hubungan.”

#### F. MANAJEMEN KONFLIK

Menurut Stephen P. Robbins ( dalam Sutrisno : 2002 : 41 ). Persepsi tentang konflik dibedakan antara pandangan lama yang bersifat tradisional dan pandangan baru yang bersifat interaksionis. **Pandangan lama melihat konflik bisa berperan salah ( dysfunctional ) dan pandangan baru melihat konflik dapat berperan secara fungsional ( functional reasons )**. Kedua pandangan tersebut dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

#### PANDANGAN LAMA DAN BARU TENTANG KONFLIK

NO	PANDANGAN LAMA	PANDANGAN BARU
1.	Konflik tidak dapat dihindarkan	Konflik dapat dihindarkan
2.	Konflik disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam perencanaan dan pengelolaan organisasi atau pengacau	Konflik timbul karena banyak sebab, termasuk struktur organisasi, perbedaan tujuan tak dapat dihindarkan persepsi, nilai-nilai pribadi dan sebagainya.
3.	Konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaannya secara optimal	Konflik dapat membantu atau menghambat pelaksanaan organisasi ( masyarakat ) dalam berbagai derajat
4.	Tugas manajemen ( pemimpin ) adalah menghilangkan konflik	Tugas manajemen ( pemimpin ) adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya
5.	Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan penghapusan konflik	Pelaksanaan kegiatan organisasi yang optimal membutuhkan tingkat konflik yang modern

Dalam menyelesaikan konflik, ada tiga istilah yang berlainan, yakni **penyelesaian konflik, pembasmian konflik dan pengaturan konflik**. Penyelesaian konflik lebih menunjukkan pada penyebab konflik. Bila berdasarkan asumsi bahwa konflik selalu terjadi dalam masyarakat karena ada kepentingan yang berlawanan, maka konflik tidak pernah dapat diselesaikan. Pembasmian konflik lebih merujuk pada manifestasi atau akibat konflik daripada penyebab konflik. Dalam jangka pendek, konflik dapat dibasmi dengan kekerasan, tetapi untuk jangka panjang tidak akan dapat ditumpas. Semakin dibasmi, akan semakin muncul konflik berikutnya yang semakin besar. Pengaturan konflik berupa bentuk-bentuk pengendalian konflik yang lebih diarahkan pada manifestasi konflik daripada penyebabnya. Asumsi yang mendasarinya adalah kalau konflik tidak akan dapat diselesaikan dan dibasmi, maka konflik dapat diatur sedemikian rupa, sehingga konflik tidak berakibat timbulnya perpecahan dalam masyarakat (Surbakti : 1992 : 159- 160 ).

Berkaitan dengan manajemen konflik, Roger W. Cobb dan Charles D. Elder ( dalam Sutrisno : 2004 : 43 ), menyebutkan ada **tiga dimensi penting dalam konflik politik**, yaitu : ( 1 ) luas konflik, menunjuk pada jumlah perorangan atau kelompok yang terlibat dalam konflik, serta skala konflik, misalnya konflik lokal, nasional atau internasional; ( 2 ) Intensitas konflik, menunjuk pada luas sempitnya komitmen sosial yang bisa terbangun akibat sebuah konflik. Konflik yang intensitasnya tinggi adalah konflik yang bisa membangun komitmen sosial yang luas, sehingga luas konflikpun berkembang; ( 3 ) Ketampakan konflik, adalah tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat di luar pihak-pihak yang berkonflik tentang konflik yang terjadi. Sebuah konflik dikatakan mempunyai tingkat ketampakan yang tinggi, manakala peristiwa konflik itu disadari dan diketahui secara detail oleh masyarakat luas.

Selain tiga dimensi di atas, Scattshneider, yang dikutip Sutrisno ( dalam Martini : 2008 ), ada konsep sosialisasi konflik dan privatisasi konflik. **Sosialisasi konflik** adalah upaya yang dilakukan oleh pihak partisipan konflik yang lemah, yakni masyarakat untuk memperluas khalayak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan sebuah konflik. Strategi ini dapat memperkuat pihak yang lemah dalam konflik. Konflik yang tersosialisasi akan membuat konflik itu berkembang dan meluas, sehingga makin besar dan luas intensitas dan ketampakannya. **Privatisasi**

**konflik** merupakan kebalikannya, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak yang kuat atau pengelola konflik untuk membatasi agar luas, intensitas dan ketampakan konflik tidak berkembang membesar.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pola manajemen konflik memiliki lima dimensi, yaitu luas, intensitas, ketampakan, sosialisasi dan privatisasi konflik. Berdasarkan lima dimensi tersebut, maka pola manajemen konflik meliputi : ( a ) membatasi luas konflik politik, ( b ) membatasi intensitas konflik politik, ( c ) membatasi ketampakan konflik politik, ( d ) membatasi Sosialisasi konflik politik dan ( e ) mengembangkan privatisasi konflik politik ( Sutrisno, 2002 : 45 ).

Melakukan manajemen konflik pada dasarnya mengelola konflik menjadi konsensus. Untuk itu, efektifitas manajemen konflik politik dapat diukur dari sejauhmana konflik politik dapat diresolusikan menjadi konsensus politik. Untuk mengukur efektifitas manajemen konflik, menurut Sutrisno ( 2002 : 46-47 ) ada tiga tingkatan, yaitu :

1. Efektifitas tinggi, yaitu manajemen konflik politik sukses mentransformasikan konflik menjadi konsensus ( konflik berhasil diresolusikan ),
2. Efektifitas semu, yaitu manajemen konflik hanya berhasil menekan konflik politik dari atas permukaan ke bawah permukaan. Ada tiga varian efektifitas semu ini, yaitu : **konflik hanya diubah dari bentuk manifes menjadi laten; konsensus seolah-olah, yaitu resolusi melalui cara represif dan resolusi seolah-olah, yaitu resolusi melalui cara koersif.** Ketiganya mempunyai kesamaan mendasar, yakni konflik tidak selesai dan juga tidak mati, melainkan hanya mengendap untuk jangka waktu tertentu dan setiap saat berpotensi untuk muncul kembali.
3. Efektifitas rendah, yaitu manajemen konflik politik tidak berhasil meresolusikan konflik menjadi konsensus, baik secara substansial maupun semu, sebaliknya konflik dimatikan secara koersif dan represif. Dengan kata lain, kemajemukan di masyarakat dimatikan dengan praktek politik totaliter.

Menurut Dahrendorf ( dalam Surbakti , 1992 : 160 ), pengaturan konflik yang efektif, sangat tergantung pada tiga faktor, yaitu: ( 1 ) kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka ( adanya pengakuan atas



kepentingan yang diperjuangkan pihak lain, ( 2 ) kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai dan terkotak-kotak, sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain, ( 3 ) kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pedoman dalam hubungan di antara mereka.

Dahrendorf menyatakan ada tiga bentuk pengaturan konflik yang efektif, yaitu :

1. Lewat mekanisme **konsiliasi**, yakni dijalankan dengan metode dialog secara terbuka baik lewat parlemen atau kuasi parlemen, dimana semua pihak yang berkonflik memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya,
2. Lewat mekanisme **mediasi**, di mana kedua pihak sepakat mencari nasehat pihak ketiga ( mediator ), yakni seorang ahli atau lembaga tertentu yang dipandang berpengetahuan dan mempunyai keahlian yang mendalam tentang hal yang dipertentangkan, namun nasehat yang diberikan tidak bersifat mengikat.
3. Lewat mekanisme **arbitrasi** ( perwasitan ). Masing-masing pihak yang berkonflik sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir yang legal sebagai jalan keluar mengakhiri konflik.

---

## RINGKASAN

Konflik merupakan fenomena yang selalu hadir dalam masyarakat, baik masyarakat sederhana maupun yang sudah maju. Semua konflik pada dasarnya terjadi karena pertentangan kepentingan. Dalam proses politik selalu terdapat konflik antara pihak-pihak yang berusaha mendapatkan sumber-sumber dengan pihak-pihak yang berusaha mendapatkan sumber –sumber tersebut. Konflik politik terjadi manakala melibatkan pemerintah atau negara. Namun konflik akan reda manakala terdapat toleransi dan interaksi sosial untuk memelihara hubungan. Konflik harus dipandang sebagai sesuatu yang dapat dikelola, bukan untuk dihilangkan, karena konflik mempunyai fungsi yang bersifat positif dan negatif. Salah satu hal pokok yang harus

dilakukan adalah bagaimana memenejemeni konflik tersebut, sehingga konflik dapat dieliminir seminimal mungkin.

### **EVALUASI**

1. Jelaskan pengertian konflik politik ?
2. Jelaskan bentuk-bentuk konflik ?
3. Jelaskan fungsi dari konflik ?
4. Jelaskan penyebab timbulnya konflik politik?
5. Jelaskan bagaimana manajemen konflik harus dilakukan ?

### **REFERENSI**

1. Idianto, M, Sosiologi Untuk SMA Kelas X, Erlangga, Jakarta, 2004
2. Sunanto, Kamanto, Pengantar Sosiologi, Edisi II, Jakarta FE-UI, 2000
3. Syarbaini, Syahril, dkk, Sosiologi dan Politik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
4. Surbakti, Ramlan, memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992
5. Suhirman, Desentralisasi dan Ekonomi Politik Perizinan : Mengambil hak yang terampas ” Jurnl Analisis Sosial Vol. 7 No. 2 Juni, 2002
6. Martini, Rina, dkk, Sosiologi Pemerintahan, UT, Jakarta, 2007
7. Said, Dzulkiah dan Said Gatara, Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, Pustaka setia, Bandung, 2007
8. . Suryadi, Budi, Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep, IRCiSoD, Yogyakarta, 2007

## **B A B VII**

### **BIROKRASI DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN**

#### **TUJUAN PEMBELAJARAN :**

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti, memahami dan menganalisa bagaimana sosiologi pemerintahan memandang birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan yang nantinya dapat diterapkan dalam lingkup pekerjaannya.

#### **PENDAHULUAN :**

Setiap hari anda dapat mengamati masyarakat datang ke lembaga pemerintah di setiap level dalam rangka memperoleh pelayanan atas kepentingannya. Kadang terdengar pujian, keluhan terhadap pelayanan yang diberikan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelayanan membutuhkan birokrasi yang profesional disertai dengan pola kepemimpinan yang tepat. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu ada komitmen bersama, khususnya di kalangan elit politik. Apalagi apabila dikaitkan dengan era globalisasi, di mana birokrasi harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.

#### **A. PENGERTIAN BIROKRASI**

Berbicara birokrasi, kita akan mempelajari pendapat dari berbagai ahli tentang konsep birokrasi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian birokrasi, diantaranya :

- 1.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulllah, taufik, dkk, Membangun Masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Milenium Ke 3, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Aditya Media, Yogyakarta, 1999
2. Budiardjo, Miriam, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa, Sinar Harapan, Jakarta, 1984
3. Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono, Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi, JIP, UNDIP, Semarang, 2002
4. Islamy, Irfan, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
5. Kantaprawira, Rusadi, Sistem Politik Indonesia, suatu Model Pengantar, sinar Baru, Bandung, 1980
6. Mac Andrews, Colin dan Moctar Mas,oed, Perbandingan Sistem Politik, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 1984
7. Rasyid, M. Ryaas, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya, 2000
8. Rina Martini, dkk, Sosiologi pemerintahan, Penerbit Universitas Terbuka Jakarta, 2007
9. Said, Dzulkiah dan Said Gatara, Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, Pustaka setia, Bandung, 2007
10. Suryadi, Budi, Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep,IRCiSoD, Yogyakarta, 2007
11. Syamsudin, Nazzaruddin, Dinamika Sistem Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1993.
12. Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi ( Edisi II ), Jakarta, FE- UI, 2000
13. Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992
14. Syafiee, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Bandung, 2005.

15. Suhirman, Desentralisasi dan Ekonomi Politik Perizinan : mengambil hak yang terampas, Jurnal Analisis Sosial Vol. 7 No. 2, Juni 2004
16. Sedarmayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan masa depan ( Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang baik ), Refika Aditama, Bandung, 2009
17. Ndraha, Taliziduhu, Kybernologi ( ilmu Pemerintahan Baru ), Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
18. Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, PT. Raja grafindo, jakarta, 2007